

TESIS

**RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF
PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK**



Disusun Oleh:

**FUTRY RACHMADEWI ILYAS
NIM. 176010200111123**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

RINGKASAN

FUTRY RACHMADEWI ILYAS, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, NOVEMBER 2019. Ratio Decidendi Penetapan Pengangkatan Anak Beragama Islam Di Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Prinsip Perlindungan Anak. Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Anggota: Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1) Apa *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl) menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam perspektif prinsip perlindungan anak? 2) Bagaimana keabsahan status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara? Tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Kendal dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam perspektif prinsip perlindungan anak juga untuk menganalisis dan menemukan keabsahan status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara preskriptif baik secara sosiologis atau teleologis dan sistematis guna memberikan argumentasi dalam menganalisis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai prosedur pengangkatan anak maka berakibat pertimbangan Hakim ada yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu Hakim mengabulkan permohonan Para Pihak yang memohon bahwa anak angkat memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sama sekali tidak menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan, yakni seharusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga, maka dari itu penetapan pengangkatan anak Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl **tidak sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak, yakni prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)** dan keabsahan status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara, **menurut Penulis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat** karena penetapan tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga yang berhak memutus perkara adalah Hakim Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

SUMMARY

FUTRY RACHMADEWI ILYAS, Master's Program in Notary, Faculty of Law Postgraduate, University of Brawijaya, November 2019. Ratio Decidendi determination of appointment of Muslim children in district courts in perspective of the principles of child protection. Advisory Commission, Chairperson: Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Member: Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

The problems examined in this thesis are: 1) What is the ratio decidendi of Kendal District Court Judge (Number: 27 / Pdt.p / 2011 / PN. Kdl) stipulate an application for the appointment of a Muslim child after the enactment of Law Number 50 2009 in the perspective of the principle of child protection? 2) How is the validity status of the adopted children upon the granting of application for the adoption of Muslim children number: 27 / Pdt.p / 2011 / PN. Kdl by the Kendal District Court with the perspective of State Administrative Law? The author's purpose for conducting this research is to identify and analyze the Decidendi ratio in the Kendal District Court to determining applications for adoption of Muslim children after the enactment of Law Number 50 Year 2009, The perspective of the principle of child protection also to analyze and find the validity of the status of adopted children upon granting the application for the adoption of Muslim children by the Kendal District Court with the perspective of State Administrative Law.

This research is a legal study using a statute approach and a case approach by using document study techniques or literature studies. Which are then analyzed in a prescriptive manner both sociologically, teleologically and systematically in order to provide arguments for analyzing the results of research that has been conducted.

The research's conclusion is that, the Compilation of Islamic Law does not regulate the procedure for adoption of children, so that judge's consideration is not accordance in a best interest of child, that is, the Judge granted the petition of Parties who requested that adopted children have the same inheritance rights as biological children. Kendal District Court Judges do not use statutory references at all, that is, the nasab relationship between adopted child and his biological parents is maintained, therefore the adoption of the child number: 27 / Pdt.p / 2011 / PN. Kdl not in accordance with one of the principles of child protection, namely the principle of the best interest of the child and the validity of the status of adopted children upon the granting of the application for the adoption of Muslim children number: 27 / Pdt.p / 2011 / PN. Kdl by the Kendal District Court with the perspective of State Administrative Law, according to the Author is invalid and does not have binding power because the determination is the absolute authority of the Religious Court, so that the right to decide on the case is the Judge of the Religious Court, not a District Court, so the determination issued by the Kendal District Court does not provide legal certainty for adopted children.

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama, Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena hanya atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “**RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK**”, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dialami selama penyusunan tesis ini, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat **Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum** sebagai pembimbing utama dan **Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H** sebagai pembimbing kedua yang selalu menyediakan waktu dan kesabaran dalam memberikan ilmu dan saran selama bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dr. Sihabudin, S.H., M.H., dan Budi Santoso S.H., LL.M., selaku dosen dan penguji penulis baik dalam sidang proposal maupun sidang akhir, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun untuk Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menempuh studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

6. Segenap Staf Sub Bagian Administrasi, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Keuangan dan Segenap Staf perpustakaan yang telah membantu penulis selama belajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Papanda tercinta Atang Hasan, S.E., M.M., dan Mamanda tersayang Sri Juminah, S.Pd., yang keduanya selalu mendoakan, membela, memeluk, memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan memberikan dukungan moril maupun materiil pada Penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Kenotariatan ini.
8. Shifa Andary Gustine yang selalu sabar, tabah dan kuat ketika Penulis pergi sementara untuk menyelesaikan tahap demi tahap tesis ini, kamu adalah motivasi utama bunda untuk memulai dan menyelesaikan kuliah di Magister Kenotariatan ini.
9. Kakak-Kakak yang selalu menghina dengan tujuan memotivasi Penulis dan membantu memberikan pengertian kepada shifa untuk tetap bersabar.
10. Seluruh keluarga besar Hj. Enim yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.
11. Sahabat-sahabat arek Malang yang selalu membantu Penulis dalam bertahan hidup.
12. Sahabat-sahabat Penulis: Agus, Indra, Rosyid, Sandi, Halit Bal, Abbas, Alfian, Wulan, Marisa, Jannah, Feny, Imam, Emira, Mbak Ken yang selalu mendukung Penulis baik moril maupun materiil dalam proses menyelesaikan kuliah.
13. Sahabat-sahabat angkatan 2005 Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta, Heru Siswanto, S.H., M.Kn., Hendra Pratama, S.H., M.H., Dr. Septa Chandra, S.H., M.H., Achmad Munadi, S.H., M.H., yang memberikan refensi, dukungan dan bantuan yang tidak terbatas pada Penulis.
14. Seluruh sahabat-sahabat angkatan 2017 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jakarta yang dari awal hingga akhir selalu bersama-sama, saling mendukung, membantu, menyewa kosan bareng untuk mengejar wisuda bersama, terima kasih atas saran, kritik dan dukungannya kepada Penulis dan semoga sukses dunia dan akherat untuk kita semua.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikannya, sukses selalu untuk kita.
16. Terakhir, kuucapkan terima kasih untuk diriku sendiri karena mampu berjuang tanpa henti dalam menyelesaikan Magister Kenotariatan dengan penuh kebanggaan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran demi sempurnanya tesis ini. Akhir kata Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Malang, November 2019

Futry Rachmadewi Ilyas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN -----	i
ORIGINALITAS PENELITIAN -----	ii
RINGKASAN -----	iii
SUMMARY -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR TABEL -----	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Rumusan Masalah-----	15
1.3 Tujuan Penelitian -----	15
1.4 Manfaat Penelitian -----	16
1.5 Kerangka Teori -----	16
1.6 Definisi Konseptual-----	24
1.7 Originalitas Penelitian-----	27
1.8 Design Penelitian-----	28
1.9 Sistematika Penulisan -----	29

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Pengangkatan Anak -----	31
2.1.1 Pengertian Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak -----	31
2.1.2 Tujuan Pengangkatan Anak-----	33
2.1.3 Syarat Pengangkatan Anak-----	35
2.2 Kajian Tentang Prinsip Perlindungan Anak -----	36
2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak -----	38
2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak-----	42
2.3 Kajian Tentang Dasar Hukum Pengangkatan Anak -----	45
2.3.1 Menurut Hukum Adat-----	45
2.3.2 Menurut Hukum Islam-----	46
2.3.3 Menurut Hukum Positif-----	47
2.4 Kajian Tentang Beberapa Cara Pengangkatan Anak -----	48
2.4.1 Pengangkatan Anak Secara Adat -----	48
2.4.2 Pengangkatan Anak Melalui Notaris-----	49
2.4.3 Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan -----	50
2.4 Kajian Tentang <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Pengangkatan Anak ----	55
2.5 Kajian Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri -----	57
2.6 Kajian Tentang Kewenangan Pengadilan Agama -----	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian -----	65
3.2 Pendekatan Penelitian -----	65
3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum -----	66
3.3.1 Jenis Bahan Hukum -----	66
a. Bahan Hukum Primer -----	66
b. Bahan Hukum Sekunder -----	67

3.3.2	Sumber Bahan Hukum -----	68
a.	Sumber Bahan Hukum Primer -----	68
b.	Sumber Bahan Hukum Sekunder -----	68
3.4	Teknik Penelusuran Bahan Hukum -----	69
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum -----	69

BAB IV RATIO DECIDENDI HAKIM DAN KEABSAHAN STATUS ANAK ANGKAT BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

A.	Posisi Kasus Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl -----	71
B.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl) Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dalam Perspektif Prinsip Perlindungan Anak -----	74
1.	Dasar Hukum -----	74
2.	Pertimbangan Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak -----	76
3.	Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak beragama Islam -----	82
a.	Kewenangan Absolut -----	82
b.	Kewenangan Relatif -----	88
4.	Pertimbangan Tentang Pembuktian -----	89
5.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl -----	96
C.	Keabsahan Status Anak Angkat Atas Dikabulkannya Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Beragama Islam Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl Oleh Pengadilan Negeri Kendal -----	121

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan -----	135
5.2	Saran -----	136

DAFTAR PUSTAKA -----	137
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR:
27/PDT.P/2011/PN. KDL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Originalitas Penelitian -----	27
Tabel 2 : Design Penelitian -----	28
Tabel 3 : Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak -----	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah. Setiap perkawinan umumnya memiliki tujuan mulia, yakni untuk menjaga kehormatan, melancarkan rejeki, menjaga keselamatan dari segala penyakit yang dapat membahayakan dan juga menjaga ketentraman jiwa, namun yang paling utama adalah untuk memelihara kelangsungan keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai dengan rumusan tersebut, dengan adanya ikatan lahir batin ini perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Menikah berarti seseorang telah memikul tanggung jawab untuk keluarga yang akan dibimbing menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Secara filosofis, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum

(*universal*). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak.¹

Anak adalah amanah dari Allah Yang Maha Esa (YME) yang telah dipercayakan kepada pasangan suami isteri untuk dibesarkan, dijaga, dididik dirawat dan dijaga hingga dewasa dan pada akhirnya mampu mandiri dengan kemampuan dirinya sendiri di dalam memenuhi kebutuhannya dan juga mampu membalas dengan sikap mengasihi dan berbakti ketika orang tua yang sudah lanjut usia serta diharapkan mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan hal yang diidamkan setiap pasangan, bagi pasangan suami isteri anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, seorang anak wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.² Hadirnya seorang anak memang menjadi impian bagi setiap pasangan suami isteri namun terkadang Tuhan belum memberikan izin untuk mengemban amanah tersebut kepada beberapa pasangan suami isteri yang begitu menginginkan kehadiran seorang malaikat kecil.

Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau menambah anggota dalam keluarga. Biasanya pasangan suami isteri yang mengangkat anak melalui pengadilan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi orang tua maupun anak angkat. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

² Mr Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 129.

menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut Bismar Siregar perlindungan hukum terhadap anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban, dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang diberikan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

³ Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15.

menyebutkan terdapat prinsip dalam perlindungan anak, prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada 4 hal berikut:

- a. Prinsip nondiskriminasi,
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*),
- c. Prinsip hak anak untuk hidup (*the right to life, survival and development*),
- d. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak perlu dipertimbangkan semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak.⁴ Akibat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, biasanya proses penilaian melibatkan lebih dari satu ahli atau institusi dan menyatukan berbagai sudut pandang dan bidang keilmuan dan (khususnya) sudut pandang anak-anak.

Disini perlu juga dijelaskan perihal pengertian dari pengangkatan anak, ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak sering disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adaption* dalam bahasa Inggris.⁵ Kata adopsi berarti pengangkatan anak sebagai anak sah.⁶

⁴ *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), par. 47.*

⁵ Musthofa Sy, **Pengangkatan Anak kewenangan pengadilan agama**, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 9.

⁶ Riduan Syahrani, **Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, (Bandung: PT. alumni, 2015), hlm. 5.

Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.⁷ Pengertian pengangkatan anak ini diatur dalam penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak pada awalnya dilandasi kepentingan atau kebutuhan sosial yang selanjutnya membutuhkan pengaturan untuk ketertiban sosial. Hukum pengangkatan anak di Indonesia saat ini adalah hukum positif Indonesia yang berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, hukum adat dan hukum Islam.⁸

Menurut hukum adat, pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.⁹ Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai, yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Melalui upacara adat pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, maka sudah sah anak itu

⁷ Musthofa Sy, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁸ Djaja S Meliala, **Pengangkatan anak (adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia**, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 10.

⁹ *Ibid.*

menjadi anak angkat, namun dalam praktik, kadang-kadang diminta juga penetapan ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Sejarah dalam Islam mencatat bahwa tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 hijriah mengemukakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.¹¹

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan perihal nasab untuk anak angkat tersebut, yakni:

“Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.”

¹¹ Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm. 40.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 masih tetap diperbolehkan namun sebagai ultimum remedium, yaitu upaya/pilihan terakhir dalam hal pengangkatan anak, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Beberapa cara pengangkatan anak yang bisa dilakukan di Indonesia yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, serta pengangkatan anak melalui pengadilan.¹²

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Menurut Bushar Muhammad secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Tunai berarti perbuatan tersebut akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).¹³

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatblad 1917 Nomor 129, untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Perkembangannya saat ini, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat

¹² *Ibid*, hlm. 49.

¹³ Bushar Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006), hlm. 33.

dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Saat ini, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.¹⁴

Pengangkatan anak melibatkan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua Angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Berikut adalah prosedur untuk para orang tua angkat yang ingin mendapatkan pengesahan penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai *yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria)*;
- b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk Penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau

¹⁴ Djaja S Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 17.

sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan Putusan Pengesahan Pengangkatan Anak.¹⁵

Pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat, oleh karena itu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan kepastian hukum. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yakni:

“Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.*
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”*

Pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka dari itu kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

¹⁵ Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 118.

Agama telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang ini:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ditegaskan pula tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49, yakni:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah.”*

Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang tersebut, yaitu:

“Pasal 49 Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1. izin beristri lebih dari seorang;*
- 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
- 3. dispensasi kawin;*
- 4. pencegahan perkawinan;*
- 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 6. pembatalan perkawinan;*
- 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;*
- 8. perceraian karena talak;*
- 9. gugatan perceraian;*
- 10. penyelesaian harta bersama;*
- 11. penguasaan anak-anak;*
- 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;*
- 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
- 14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
- 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
- 16. pencabutan kekuasaan wali;*
- 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*
- 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
- 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
- 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*

22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain."*

Di undangkannya Undang-Undang Peradilan Agama mengandung arti bahwa kewenangan mengadili permohonan penetapan pengangkatan anak bagi para pemohon yang beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Agama. Kenyataannya, dalam praktik ada orang-orang beragama Islam yang masih mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Seperti contoh kasus dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl mengenai pengangkatan anak para Pemohon beragama Islam tetapi penetapan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal dan permohonan untuk mensahkan pengangkatan anak tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara orang-orang yang beragama Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengaturan maupun penjelasan mengenai prosedur pengangkatan anak, hal ini menimbulkan **kekosongan hukum**, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengemukakan tentang pengertian anak angkat dalam subbab kewarisan.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan *Vacuum (Bld)* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan kosong atau lowong, dari penjelasan diatas maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu)

dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan.¹⁶

Menurut hemat Penulis hal ini menimbulkan masalah tentang bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa dan juga memutus permohonan penetapan pengangkatan anak jika diajukan oleh pemohon yang beragama Islam, karena akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan, dalam hal ini adalah status anak angkat menjadi tidak ada kepastian hukum. Kewenangan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Agama dalam hal memberikan penetapan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam mungkin saja dapat memberikan pilihan bagi pemohon di dalam mengajukan permohonan mengangkat anak atau mungkin saja akan timbul sengketa kewenangan dan status dari anak angkat tersebut apakah sah atau tidak, menjadi tidak jelas (kabur), maka dari itu sangat diperlukan kejelasan yang bersangkutan dengan kewenangan dan substansi hukum yang merupakan dasar dari kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta segala hal dari akibat hukum bagi status anak angkat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, yaitu prinsip

¹⁶ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 12.

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) ataukah justru penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal hanya sekedar mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penulis dalam penelitian ini sangat tertarik untuk mengkaji dua rumusan masalah berikut, yaitu:

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl) menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam perspektif prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimana keabsahan status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Kendal dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam perspektif prinsip perlindungan anak.
2. Menganalisis dan menemukan keabsahan status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya bagi pengembangan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para pembuat undang-undang, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama, para pemohon dan notaris khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

1.5 KERANGKA TEORI

Kerangka teori penelitian ini, penulis menggunakan teori kewenangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perihal *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal yang berhubungan dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, penulis juga menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis keabsahan status anak angkat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power, a right to command or to act, the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah

kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁷

Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek negatif (*het negatieve aspect*).

Aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*).

Aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.

c. Aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*).

Aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹⁸

¹⁷ Nur Basuki Winarno, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi**, (Yogyakarta: Laksbang Mediatam, 2008), hlm. 65.

¹⁸ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 90.

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Henc van Maarseveen menggunakan dua (2) istilah dalam menjelaskan konsep kewenangan, yaitu menganalisis Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai *document van attribute*, digunakan istilah kekuasaan (*power*) sedangkan dalam menganalisis “pendelegasian” digunakan istilah wewenang (*authority*). Maarseveen juga mengemukakan ada dua (2) konsep kekuasaan, yakni kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum yang disebut *blotemacht*, dalam Bahasa Inggris *neck power*. Di sisi lain kekuasaan yang berdasarkan pada hukum disebut wewenang.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan, jadi dalam hal konsep hukum publik, wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan.²⁰ F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan AR berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.²¹

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan

¹⁹ Lukman Hakim, **Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah**, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 74.

²⁰ Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September–Desember, 1997, hlm. 1.

²¹ Ridwan HR, **Op.Cit.**, hlm. 100.

tertentu.²² Selain itu juga kewenangan dijelaskan R.J.H.M. Huisman bahwa kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang.²³

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum,
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya,
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁴

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

²² Agussalim Andi Ganjong, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

²³ *Ibid*, hlm. 103.

²⁴ Nur Basuki Winarno, **Op.Cit.**, hlm. 66.

a) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut pada umumnya berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam melaksanakan kewenangan atribut tersebut pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau pejabat yang tercantum dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut ini mengenai tanggung gugat dan tanggung jawabnya ada pada badan atau pejabat yang tercantum dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c) Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.²⁵

Penulis dalam menganalisis masalah yang pertama dan kedua dalam penelitian ini lebih dekat dengan teori kewenangan menurut pandangan Verhey, dimana dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang.

²⁵ *Ibid*, hlm. 70.

b. Teori Kepastian Hukum

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, oleh karenanya dengan adanya kepastian hukum tersebut masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tetapi apabila terlalu bertumpu kepada kepastian hukum, dan terlalu ketat di dalam mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Namun apapun yang terjadi dalam peraturannya adalah demikian dan memang harus ditaati dan dilaksanakan.²⁶ Undang-Undang itu memang sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang adalah keras, namun memang demikianlah bunyinya).²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi tiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum tersebut tiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu tersebut.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

²⁷ *Ibid*, hlm. 161.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *Positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang, namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan, oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misalnya undang-undang antar penduduk dibuat secara umum, yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum, walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beraneka warnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum dalam praktik untuk sebagian tertampung karena hakim pada saat melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata dalam mentafsirkan peraturan-peraturan dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan, tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya

²⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), Hlm. 385.

²⁹ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 23.

dapat dilakukan. Hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna, karena itu hukum terpaksa mempunyai sifat kompromi. Terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna.³⁰

Menurut Bachsan Mustafa, teori kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut:

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.³¹

Kepastian hukum juga dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.³²

Menganalisis permasalahan yang kedua penulis menggunakan teori

³⁰ L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 14.

³¹ Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm. 53.

³² Riduan Syahrani, **Op.Cit.**, hlm. 124.

kepastian hukum dari Bachsan Mustafa, dimana penetapan tentang pengangkatan anak harus pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara, karena kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

a. Ratio Decidendi

Ratio decidendi (pertimbangan hakim) merupakan alasan atau argument yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* juga dapat diartikan sebagai keputusan para dewan hakim yang didasarkan dari fakta-fakta materi.³³

b. Pengangkatan Anak

Penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

c. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, namun Penulis **menitikberatkan pada 1 prinsip dalam penelitian ini, yakni prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)**, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan

³³ I. P. M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 475.

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

d. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. PN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, PN ini fungsinya untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata bagi rakyat Indonesia pencari keadilan. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) merupakan pengadilan tingkat pertama yang tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. PA dibentuk oleh Keputusan Presiden. Wewenang Pengadilan Agama yaitu menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat Indonesia pencari keadilan yang menangani perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

f. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan

berarti sifat yang sah. Keabsahan juga berarti kesahan.

1.7 ORIGINALITAS PENELITIAN

Tabel 1: Originalitas penelitian

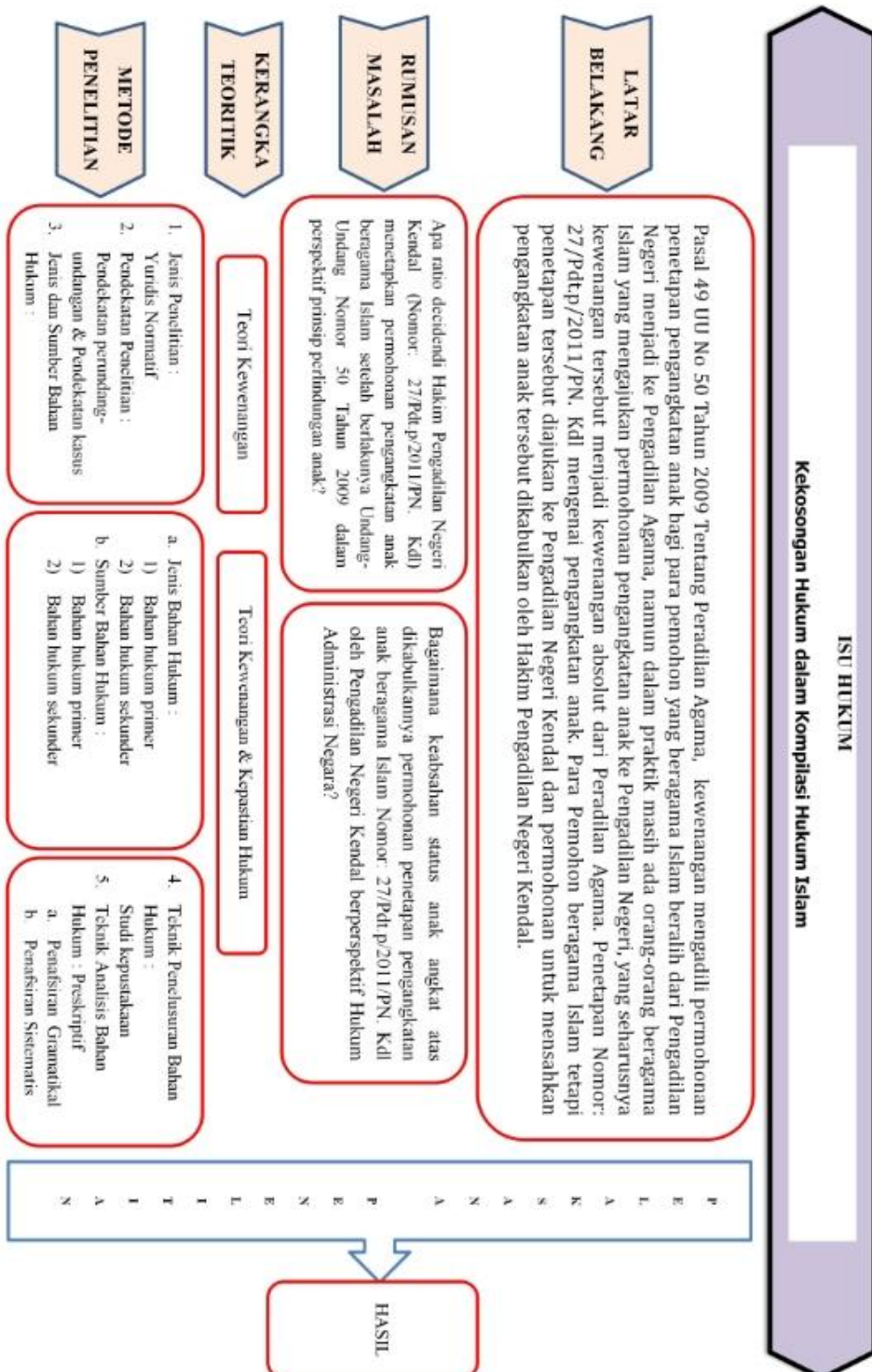
Tahun Penelitian	Asal Instansi	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Perbedaan
2014	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat	Beni Sulistyio	1. "Bagaimanakah proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?" 2. "Akibat hukum apa sajakah yang timbul terhadap anak setelah diangkat?"	"Dari uraian tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah bahwa fokus penelitian ini mengenai: Proses pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan dan akibat hukum setelah pengangkatan anak."
2015	Universitas Jenderal Soedirman	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim	Benny Zuliansyah	1. "Mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN)."	"Dari uraian tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah bahwa fokus penelitian ini mengenai: Pelaksanaan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak."
2017	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Dan Putusan Pengadilan Negeri Tentang Pengangkatan Anak	Mohamad Roziq	1. "Bagaimana persamaan dan perbedaan Putusan Pengadilan Agama No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak?"	"Dari uraian tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah bahwa fokus penelitian ini mengenai: Analisis tentang putusan Pengadilan Agama dan mencari persamaan maupun perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak."
2010	Universitas Diponegoro	Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi	Risko El Windo Al Jufri	1. "Bagaimanakah pengangkatan anak pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi?" 2. "Bagaimanakah kedudukan anak angkat keturunan Tionghoa atas harta waris sesuai dengan hukum waris adat Tionghoa di Kota Jambi?"	"Dari uraian tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah bahwa fokus penelitian ini mengenai: Menganalisis pengangkatan anak keturunan Tionghoa dan analisis kedudukan anak angkat dan pembagian waris adat Tionghoa."
2011	Universitas Indonesia	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak	Tria Juniati	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) di Indonesia? 2. Apakah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak?	"Dari uraian tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah bahwa fokus penelitian ini mengenai: Analisis tentang pengangkatan anak WNI oleh WNA dan menganalisis tentang perlindungan hukum untuk anak angkat yang di angkat oleh WNA."

Persamaan

Dari uraian tersebut, maka persamaan penelitian yang telah dikemukakan di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah semuanya membahas tentang pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia.

1.8 DESIGN PENELITIAN

Tabel 2: Design Penelitian



1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) Bab yang digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup masalah yang diteliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan penulis gunakan untuk menguraikan tinjauan pustaka yang terkait dengan bahasan mengenai pengangkatan anak, kewenangan Pengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Agama sedangkan kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan tesis, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, dengan fokus analisa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutuskan penetapan pengangkatan anak, dan akibat hukum mengenai keabsahan penetapan

pengangkatan anak apabila penetapan pengangkatan anak beragama Islam dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan kristalisasi atau endapan sari dari seluruh uraian pada bagian bagian sebelumnya, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut, Peneliti berusaha untuk merakit secara runtun bab-bab yang telah diuraikan ke dalam satu kesatuan yang tercipta pada judul tesis guna pemberian saran sebagai bentuk kontribusi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK

2.1.1 Pengertian Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak

Pengertian tentang anak angkat atau adopsi, dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu secara etimologi dan secara terminologi.

1) Secara etimologi

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. *Tabanni* istilah dalam bahasa arab yang menurut prof. Mahmud Yunus dapat diartikan dengan mengambil anak angkat. Adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda atau adopt (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.³⁴

Penekanannya disini ada pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.³⁵

2) Secara terminologi

Arti anak angkat dijumpai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.³⁶

Adopsi, dalam Ensiklopedia Umum adalah suatu cara untuk mengadakan

³⁴ Zaini Muderis, **Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: PT. Bina aksara, 2006), hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/anak>, (diakses pada tanggal 25 Mei 2019 jam 21.00).

hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.³⁸

Soerjono Soekanto memberikan pengertian anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.³⁹

Anak angkat juga didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9:

“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Wali yang sah, Keluarga Orang Tua, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan Anak tersebut masuk ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

³⁷ Zaini Muderis, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Waris di Indonesia**, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 37.

³⁹ Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 251.

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Anak yang diadopsi disebut anak angkat, pengangkatan anak adalah peristiwa hukumnya. Menurut Andi Syamsu, mengangkat seorang anak berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan anak angkat tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴⁰

Pengertian pengangkatan anak menurut penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

2.1.2 Tujuan Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak dikalangan masyarakat mempunyai beberapa macam tujuan maupun motivasi. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi yang sangat kuat terhadap pasangan suami istri apabila telah divonis tidak mendapatkan keturunan atau tidak memungkinkan melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

⁴⁰ Andi Syamsu, M. Fauzan, **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam**, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut sangat memberikan jaminan perlindungan untuk seorang anak yang pasti masih sangat bergantung pada orang tuanya. Selain untuk melanjutkan keturunan, pengangkatan anak tidak jarang bertujuan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan agar tidak berujung perceraian ketika pasangan suami isteri tidak dianugerahi seorang anak, karena kepentingan akan keutuhan rumah tangga tidak hanya untuk kedua belah suami isteri saja namun untuk kepentingan anak-anak yang telah dihadirkan dalam perkawinan tersebut.

Menurut Irma S Soemitro terdapat beberapa alasan yang menjadi tujuan untuk mengangkat anak, antara lain:

- a. Keinginan untuk mempunyai anak/keturunan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- c. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.⁴¹

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama yaitu untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan orang tua angkat, yang kedua adalah untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan

⁴¹ Irma Setyowati Soemitro **Op.Cit.**, hlm. 40.

yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Tujuan yang kedua, saat ini menekankan pada kepentingan terbaik anak.⁴²

2.1.3 Syarat Pengangkatan Anak

Secara umum syarat-syarat pengangkatan anak bisa dilakukan terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Pengangkatan anak kembar dikecualikan dan dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.⁴³

Para calon orang tua angkat pada umumnya akan mengangkat anak yang masih bayi, namun tidak menutup kemungkinan ada pasangan suami isteri yang mengangkat anak yang sudah beranjak dewasa. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat calon anak angkat dalam Pasal 12, yakni:

1. *“Syarat anak yang akan diangkat meliputi :*
 - a. *Belum berusia 18 tahun,*
 - b. *Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,*
 - c. *Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan*
 - d. *Memerlukan perlindungan khusus.”*

Pasal 13, menentukan :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:”

- a. *“Sehat jasmani dan rohani,*
- b. *Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,*
- c. *Beragama sama dengan agama calon anak angkat,*
- d. *Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan,*
- e. *Berstatus menikah paling singkat 5 tahun,*

⁴² Musthofa Sy, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁴³ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 117.

- f. *Tidak merupakan pasangan sejenis,*
- g. *Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,*
- h. *Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,*
- i. *Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,*
- j. *Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,*
- k. *Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,*
- l. *Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan*
- m. *Meperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi sosial.”*

Ketentuan pengangkatan anak ini juga diatur dalam *Staatblad* 1917 Nomor 129 namun *Staatblad* ini hanya berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa. Dalam *Staatblad* mengenai calon anak angkat dapat diketahui dari Pasal 6:

“Yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak berisitri pun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat anak oleh orang lain.”

2.2 KAJIAN TENTANG PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan manusia yang paling lemah, pada umumnya anak sangat bergantung pada manusia dewasa, anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih labil. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian

masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya, oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.⁴⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2):

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.”

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya⁴⁶:

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pasal 16 ayat (3) DUHAM) dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan

⁴⁴ Marlina, **Peradilan Anak di Indonesia**, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 23.

⁴⁵ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 40.

⁴⁶ Muhammad Joni dan Zulchaena Z.T, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak**, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm. 98.

mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.

- b. *The Convention on The Elimination of All Discrimination Againsts Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1979 dan mulai berlaku sebagai suatu *treaty* pada tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.
- c. *Convention on The Rights if The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar

konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup. Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.
- 2) Hak atas perlindungan, yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.
- 3) Hak untuk dapat berkembang Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.
- 4) Hak anak untuk berpartisipasi Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa. Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.

- d. *The United Nations Guidlines for The Erevention of Juvenile Delinquency (The Riyald Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang *Juvenile delinquency* dan *youth crimer* merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana

anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.⁴⁷

- e. *The United Nations Standart Minimum Rules for The Administrations of Juvenile. Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.
- f. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, yang diadakan di Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus-6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasanbatasan yang diambil dalam tingkatan International dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan cukup, pengganti kerugian, ganti-rugi dan bantuan sosial untuk korban kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah *victimisasi* dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.
- g. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)*. Konvensi tentang Perbudakan Tahun 1926, dan Suplemen Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Suplemen Konvensi tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam Konvensi 1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan instutusi perbudakan yang muncul

⁴⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 33.

dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak dan anak muda belia yang sedang tumbuh. Pasal 1 Konvensi 1956 ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.

- h. *The Convention on the Suppression of Trafic in Persons and The Eksploitation of the Prostitution of Others* (1949). Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.
- i. *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Tahun 1966. Pasal 7 menyebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusia dan penurunan derajat manusia.
- j. *The Labour Convention of the International Labour Organization* :
 - 1) Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang Kerja Paksa (force labour) dan Penghapusan Kerja Paksa.
 - 2) Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang Kerja Malam Hari bagi Pekerja Usia Muda.
 - 3) Konvensi Nomor 138 tentang Batas Minimum bagi Anak-Anak yang Boleh Bekerja.
- k. *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code* (1985) yang telah disahkan oleh WTO (*World Tourism Organization*). Dalam Pasal VI disebutkan bahwa

negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dan segala maksudnya

1. *Refugee and Humanitarian Law*. Hukum Pengungsian dan Kemanusiaan. Instrumen Internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan⁴⁸:

- 1) Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
- 2) Penegakkan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
- 3) Melakukan program aksi konkret yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak tersebut berupa mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan membahayakan bagi anak tersebut, apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan. Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan

⁴⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.Cit.*, hlm. 101.

Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada 4 hal berikut:

- a. Prinsip nondiskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dimana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- c. Prinsip hak anak untuk hidup (*the right to life, survival and development*). Adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup.

- d. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*) adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hak ini juga merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu menghormati serta menghargai pandangan serta pendapat anak, sehingga anak merasa bahwa ia mendapatkan perhatian.

Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak-anak perlu dipertimbangkan semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak.⁴⁹ Akibat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, biasanya proses penilaian melibatkan lebih dari satu ahli atau institusi dan menyatukan berbagai sudut pandang dan bidang keilmuan dan (khususnya) sudut pandang anak-anak.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak, seperti yang dijabarkan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB:

- 1) Pandangan dan aspirasi anak.
- 2) Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi.

⁴⁹ *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), par. 47.*

- 3) Perawatan, perlindungan dan keamanan anak.
- 4) Kesejahteraan anak.
- 5) Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga.
- 6) Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa.
- 7) Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan.
- 8) Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang.
- 9) Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan.
- 10) Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.
- 11) Kebutuhan lain yang spesifik.⁵⁰

2.3 KAJIAN TENTANG DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK

2.3.1 Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.⁵¹ Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai, yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Melalui upacara adat pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat, namun dalam praktik, kadang-kadang diminta juga penetapan ke Pengadilan Negeri.⁵²

⁵⁰ *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), Bab V.A.1 dan par. 44.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 9.

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 50 ayat

(1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

2.3.2 Menurut Hukum Islam

Sejarah dalam Islam mencatat bahwa tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 hijriah mengemukakan sebagai berikut :

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.⁵³

2.3.3 Menurut Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga KUHPerdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.⁵⁴

⁵³ Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm. 40.

⁵⁴ Zaini Muderis, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak.

Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cukup lama setelah diundangkannya peraturan tentang kesejahteraan anak, kemudian muncullah Undang-Undang Perlindungan Anak, Pada bab VIII, khususnya dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2.4 KAJIAN TENTANG BEBERAPA CARA PENGANGKATAN ANAK

2.4.1 Pengangkatan Anak Secara Adat

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Menurut Bushar Muhammad secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah

terjadi pengangkatan anak. Tunai berarti perbuatan tersebut akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).⁵⁵

Wujud dilakukan pengangkatan anak secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, *selametan*, dan doa disaksikan oleh lurah dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya, namun didaerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.⁵⁶

2.4.2 Pengangkatan Anak Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatblad* 1917 Nomor 129, untuk hal pengangkatan anak diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan Balai Harta Peninggalan, apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

⁵⁵ Bushar Muhammad, *Loc. Cit.*

⁵⁶ J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2000), hlm. 263.

Kesepakatan antara para pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10 *Staatblad* 1917 Nomor 129 yang secara imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri dihadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.⁵⁷

Perkembangannya saat ini, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Saat ini, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁵⁸

2.4.3 Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 224.

⁵⁸ Djaja S Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 17.

lingkungan Keluarga Orang Tua Angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Prosedur untuk para orang tua angkat yang ingin mendapatkan pengesahan penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai *yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria)*;
- b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk Penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan Putusan Pengesahan Pengangkatan Anak.⁵⁹

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 antara lain mengatur masalah pengangkatan anak antar negara (*inter country*), yaitu antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, juga mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Didalam SEMA yang telah disebutkan tersebut bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh

⁵⁹ Rusli Pandika, *Loc.Cit.*

Warga Negara Asing merupakan hal yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu sebagai pilihan terakhir. Dalam SEMA tersebut mengatur pula masalah tata persidangan tentang permohonan pengangkatan anak.

Menurut SEMA tersebut ada tiga mekanisme pengangkatan anak:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).
2. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*).
3. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).

Pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat, oleh karena itu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan kepastian hukum. Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yakni:

“Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.*
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.”*

Pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka dari itu kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, kemudian Undang-Undang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ditegaskan pula tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49, yakni:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah.”*

Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yaitu:

“Pasal 49 Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1. izin beristri lebih dari seorang;*
- 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
- 3. dispensasi kawin;*
- 4. pencegahan perkawinan;*
- 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 6. pembatalan perkawinan;*
- 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;*
- 8. perceraian karena talak;*
- 9. gugatan perceraian;*
- 10. penyelesaian harta bersama;*
- 11. penguasaan anak-anak;*
- 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;*
- 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
- 14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
- 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
- 16. pencabutan kekuasaan wali;*
- 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”*

Di undangkannya Undang-Undang Peradilan Agama mengandung arti bahwa kewenangan mengadili permohonan penetapan pengangkatan anak bagi para pemohon yang beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Agama.

2.5 KAJIAN TENTANG *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PENGANGKATAN ANAK

Definisi *ratio decidendi* adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.⁶⁰ *Ratio decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Menurut Kuswadi Pudjosewojo dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu).⁶¹ Menurut Godheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta materiil tersebut diperhatikan karena untuk Hakim melakukan interpretasi fakta tersebut.⁶²

⁶⁰ I.P.M Ranuhandoko, *Loc., Cit.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ian McLeod, *Legal Method*, (London: Macmillan, 1999), hlm. 144.

Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Indonesia adalah negara hukum yang menganut *civil law* sistem, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran Menimbang pada Pokok Perkara.

Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.⁶³

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu, dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat

⁶³ Abraham Amos H.F, **Legal Opinion Teoritis & Empirisme**, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.⁶⁴

Hakim dalam memutuskan perkara terbagi menjadi 2 kewenangan/kompetensi dalam mensahkan pengangkatan anak, menurut Rusli Pandika, yang pertama, yaitu kompetensi relatif, dimana pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang diangkat. Kedua, kompetensi absolut, dimana badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan adalah Pengadilan Negeri.⁶⁵

2.5 KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri ini fungsinya untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata bagi rakyat Indonesia pencari keadilan. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum, Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 119.

⁶⁵ Rusli Pandika, **Op.Cit.**, hlm. 119.

Menurut Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Menurut Pasal 3 ayat (1), Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri.
- b. Pengadilan Tinggi.

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan.

Kompetensi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).⁶⁶ Setiap mengajukan gugatan agar suatu gugatan tidak salah diajukan, maka harus memperhatikan secara benar dan tepat dimana harus mengajukan ke badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili tiap permasalahan.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang

⁶⁶ Zainal Asikin, **Hukum Acara Perdata Di Indonesia**, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 83.

hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut, kemudian dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 134 HIR menetapkan:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Pada perkara perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kompetensi/kewenangan, yaitu:

- a. Kompetensi absolut/mutlak atau *absolute competentie*: kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.⁶⁷ Menurut Retnowulan wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.⁶⁸
- b. Kompetensi relatif atau *relative competentie*: kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 84.

⁶⁸ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek**, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.⁶⁹

Menurut hukum acara perdata, dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Azasnya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan *Actor Sequitur Forum Rei*.⁷⁰

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya.

Menurut Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 ditetapkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada Pasal 24 ayat (1) bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁶⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 88.

⁷⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 12.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2.6 KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷¹

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁷²

Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota

⁷¹ Abdul Halim, **Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 12.

⁷² Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 5.

dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.⁷³

Kewenangan absolut pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁷⁴

Pada awalnya pengadilan yang berwenang mengenai pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri, namun saat Undang-Undang Peradilan Agama diberlakukan maka PA mempunyai kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak untuk yang beragama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama salah satunya adalah tentang perkawinan. Pengangkatan anak menjadi

⁷³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 undang-undang tersebut, yakni penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan bersifat **yuridis normatif**, terutama ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta keabsahan status anak angkat dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl.

Menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁵ Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁷⁶

3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dari beberapa pendekatan yang telah disebutkan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menggunakan dua pendekatan tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis penerapan dari Undang-Undang Peradilan Agama, dimana penetapan pengangkatan anak beragama Islam Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kendal telah sah dan sesuai dengan

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 41.

kewenangan pengadilan tersebut atau kah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status anak angkat yang bersangkutan.

3.3 JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

3.3.1 Jenis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma-norma dasar dan yurisprudensi maupun traktat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

1. Penetapan Pengadilan negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1905, Pasal 1907 ayat (1).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, khususnya Pasal 16 ayat (1), , Pasal 18, Pasal 26 ayat (1).
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, khususnya Pasal 50.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, khususnya Pasal 2, Pasal 49, penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, khususnya Pasal 63.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979, khususnya Pasal 12, Pasal 12 ayat (1).
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, khususnya Pasal 1 angka 9, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan (2), penjelasan Pasal 12 ayat (1).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768, khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 butir 5, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16.
11. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 209 ayat (2), Pasal 171 huruf h.
12. HIR, khususnya Pasal 163, Pasal 164
13. RBg, khususnya Pasal 283, Pasal 284
14. SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama yakni buku teks, hal ini karena buku teks yang berisi mengenai pandangan-pandangan klasik para sarjana

yang mempunyai kualifikasi tinggi dan prinsip dasar ilmu hukum.⁷⁷ Penelitian yang digunakan dalam bahan hukum sekunder yakni meliputi:

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum,
2. Makalah-makalah,
3. Jurnal ilmiah,
4. Artikel ilmiah.

3.3.2 Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menjadi bahan-bahan penelitian yang berupa Bahan Hukum Primer diperoleh di:

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Malang.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok.
4. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
5. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjadi bahan-bahan penelitian yang berupa Bahan Hukum Sekunder diperoleh di:

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
2. Perpustakaan Pusat, Universitas Brawijaya, Malang.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 142.

4. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
5. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang.
6. Media Internet.

3.4 TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Teknik penelusuran bahan hukum yang dimaksudkan guna mendapatkan bahan hukum di dalam penelitian ini. Teknik penelusuran bahan hukum yang berkaitan dan mendukung pemaparan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik tersebut berguna untuk meraih atau mendapatkan landasan teori yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku, arsip, dokumen dan hasil penelitian yang lainnya baik cetak maupun elektronik yang tentunya berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam rangka menetapkan permohonan pengangkatan anak.

3.5 TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Penelitian yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya **preskriptif**, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang seyogyanya atau yang seharusnya.

Penafsiran terhadap undang-undang yang akan digunakan di dalam penelitian ini yakni:

1. Penafsiran Sosiologis atau Teleologis

Metode ini menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi, suatu undang-undang yang masih berlaku, tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian berdasarkan penafsiran ini diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan

masa kini dengan tidak memedulikan apakah hal itu pada waktu diundangkannya undang-undang dikenal atau tidak,⁷⁸ dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl, Hakim tetap mengabulkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam karena lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif pengangkatan anak yang diajukan untuk tujuan kebaikan yang terbaik bagi anak namun tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan.

2. Penafsiran Sistematis

Menafsirkan kata dalam undang-undang yaitu dengan jalan menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya di dalam suatu perundang-undangan atau dengan perundang-undangan lainnya.⁷⁹ Terjadinya suatu perundang-undangan pasti selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya juga, dan sudah jelas tidak ada undang-undang yang memang berdiri sendiri atau benar-benar terlepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang adalah bagian dari keseluruhan dalam sistem perundang-undangan.

Selanjutnya bahan tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

⁷⁸ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 192.

⁷⁹ Achmad Ali, **Op.Cit.**, hlm. 11.

BAB IV

RATIO DECIDENDI HAKIM DAN KEABSAHAN STATUS ANAK ANGKAT BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

A. Posisi Kasus Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl⁸⁰

Sub bab ini Peneliti akan memaparkan posisi kasus dari Penetapan Pengangkatan Anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl, dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh BUDI HARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Pemohon dalam perkara pengangkatan anak ini adalah ACHMAD SUBECHI, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan SITI FAYATUN, umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang selanjutnya disebut Pemohon, keduanya adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2001 di KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 6 Juli 2011 di bawah register Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dan mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa selama pernikahan yaitu kurang lebih 10 tahun, para Pemohon tidak dikaruniai anak. Didorong oleh rasa keinginan untuk mempunyai anak, maka pada tanggal 13 Juni 2011, para Pemohon telah mengangkata seorang anak perempuan bernama: ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak dari seorang ibu yang bernama SUWARTINI. Anak tersebut telah diasuh/dipelihara oleh para pemohon sejak anak tersebut lahir dan diperlakukan seperti anak kandung. Pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Desa setempat, maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah demi masa depan anak agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Untuk mmpерkuat pengangkatan anak ini maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan

⁸⁰ Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl.

ini dan selanjutnya setelah Para Pemohon dipanggil serta didengar keterangannya, selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu yang bernama SUWARTINI.
3. Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Para Pemohon benar-benar telah sepakat berkeinginan mengangkat seorang anak dan berharap di kemudian hari anak tersebut dapat menjaga dan memelihara pemohon di hari tua, serta demi kesejahteraan anak yang lebih baik di kemudian hari. Para Pemohon telah menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.

Pemohon telah mengambil anak tersebut dari orang tuanya sejak lahir sampai sekarang dan pada waktu mengambil anak tersebut dan pemohon telah melakukan secara adat, telah pemohon selamati dengan mengundang para tetangga dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Pengantar Desa Kalirejo Nomor : 145/843/VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi, fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 257/21/ IX/2001, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1119 / 2011 tertanggal 27 Juni 2011 bahwa di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu, perempuan dari perempuan SUWARTINI dan dokumen surat lainnya serta Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, penyerahan mana dilakukan secara sukarela. Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 saksi yang telah disumpah serta keterangan dari ibu Kandung dari ZASKIA NABILA PUTRI.

Pertimbangan Hakim setelah memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan para pihak selanjutnya mempertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah pula dilakukan menurut cara-cara/kebiasaan-kebiasaan setempat, maka dilihat dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku telah bersesuaian dengan norma adat yang berlaku di desa Para Pemohon. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya.” Berdasarkan Pasal 1

angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 - nya disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Bab I. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab I. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Para Pemohon setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya.

Penetapan Pengadilan Negeri Kendal:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut.
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu yang bernama SUWARTINI.
3. Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
4. M
 embebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

B. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl) Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dalam Perspektif Prinsip Perlindungan Anak

1. Dasar Hukum

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl merupakan permohonan pengangkatan anak. Dasar hukum hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Dasar hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 2:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ditegaskan pula tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49, yakni:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*

- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah."*

Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yaitu:

"Pasal 49 Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1. izin beristri lebih dari seorang;*
- 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
- 3. dispensasi kawin;*
- 4. pencegahan perkawinan;*
- 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 6. pembatalan perkawinan;*
- 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;*
- 8. perceraian karena talak;*
- 9. gugatan perceraian;*
- 10. penyelesaian harta bersama;*
- 11. penguasaan anak-anak;*

12. *ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;*
13. *penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
14. *putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
15. *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
16. *pencabutan kekuasaan wali;*
17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*
19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain."*

2. Pertimbangan Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan

pengadilan.⁸¹ Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak, yang pertama, yakni tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentieus* (*contentieus jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya. Kedua, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.⁸²

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, kemudian permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga, selanjutnya, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan,

⁸¹ Harjono, **Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

⁸² Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan *hukum* (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.⁸³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak belum sepenuhnya mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur, syarat-syarat pengangkatan anak dan permohonan penegasan pengangkatan anak ini telah diatur dalam SEMA tersebut.

Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti SEMA yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa permohonan adalah perkara perdata yang terdiri atas satu pihak saja, yaitu pemohon sendiri, jadi tidak ada pihak lawan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada atau tidak dikenal upaya hukum

⁸³ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 29.

di dalam permohonan. Permohonan yang tidak diterima, misalnya, menyangkut masalah kompetensi pengadilan maka dapat diajukan kembali kepada pengadilan lain yang berwenang.⁸⁴

Mengajukan permohonan pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan-perundangan di Indonesia. Secara umum syarat-syarat pengangkatan anak bisa dilakukan terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Pengangkatan anak kembar dikecualikan dan dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.⁸⁵

Para calon orang tua angkat pada umumnya akan mengangkat anak yang masih bayi, namun tidak menutup kemungkinan ada pasangan suami isteri yang mengangkat anak yang sudah beranjak dewasa. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat calon anak angkat dalam Pasal 12, yakni:

“Syarat anak yang akan diangkat meliputi :

- a. Belum berusia 18 tahun,*
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,*
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan*
- d. Memerlukan perlindungan khusus.”*

Pasal 13, menentukan :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:”

- a. “Sehat jasmani dan rohani,*
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,*
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 123.

⁸⁵ Rusli Pandika, hlm 117.

- d. *Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan,*
- e. *Berstatus menikah paling singkat 5 tahun,*
- f. *Tidak merupakan pasangan sejenis,*
- g. *Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,*
- h. *Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,*
- i. *Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,*
- j. *Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,*
- k. *Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,*
- l. *Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan*
- m. *Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi sosial.”*

Menyimpang dari syarat bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah tersebut di atas, bagi pengangkatan anak antar WNI masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, yaitu sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.*
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.*

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, yang dimaksud lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam pertimbangan hukumnya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.”

“Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan anak yang akan diangkat yaitu ZASKIA NABILA PUTRI telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud.”

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan,”

Para Pemohon dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl adalah para pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan pengangkatan anak ini karena telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon orang tua angkat bagi anak angkat tersebut karena agama yang sama, yaitu agama Islam dan memenuhi persyaratan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf c, serta memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Seseorang dapat menjadi sah dalam berperkara di pengadilan jika memenuhi persyaratan, yaitu mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara, cakap bertindak hukum, telah dewasa atau telah cukup umur, tidak berada di bawah pengampuan.⁸⁶

Pihak yang dianggap tidak mampu dalam berperkara adalah mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka yang sakit ingatan dan mereka

⁸⁶ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 32.

yang telah meninggal dunia.⁸⁷ Para Pemohon dalam permohonannya dapat dipastikan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara permohonan pengangkatan anak tersebut dan dapat dilihat dari identitas Para Pemohon yang telah cukup umur, tidak sakit ingatan, juga masih dalam keadaan hidup, maka sudah tentu dapat berperkara di pengadilan.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak beragama Islam

Hakim dalam memutuskan perkara terbagi menjadi 2 kewenangan/kompetensi dalam mensahkan pengangkatan anak seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yang pertama, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Berikut akan Penulis jabarkan mengenai 2 (dua) kompetensi tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam.

e. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut/mutlak atau *absolute competentie* adalah kewenangan absolut pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.⁸⁸ Menurut Retnowulan wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam

⁸⁷ Soeroso, **Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

⁸⁸ Zainal Asikin, **Op., Cit.**, hlm. 83.

pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.⁸⁹

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Kewenangan absolut Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁹⁰

Kompetensi absolut Pengadilan Agama secara normatif, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 49, salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut adalah tentang

⁸⁹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op., Cit.*, hlm. 11.

⁹⁰ Roihan A. Rasyid, *Op., Cit.*, hlm. 27.

perkawinan. Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang tersebut, yakni penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Ada dua pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama. Pandangan pertama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pengangkatan anak. Badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan Undang-Undang menjadi wewenang badan peradilan.⁹¹

Kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Agama sebagai wewenang Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.

Menurut pandangan pertama tersebut bahwa dasar kewenangan mengadili tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara implisit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak.

⁹¹ Mustofa Sy, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Pendapat kedua, memandang Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya merujuk Pasal 26 ayat (1) undang-undang yang sama, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah dalam hukum Islam.⁹²

Menurut pandangan Wantjik Saleh, mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dimana permohonan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan macam itu.⁹³ Pandangan beliau sejalan dengan pandangan kedua yang telah diuraikan sebelumnya.

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama, yang mana dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut secara tegas menentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil

⁹² *Ibid*, hlm. 66.

⁹³ K. Wantjik Saleh, **Hukum Acara Perdata RBg/HIR**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 105.

yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang perkara perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam dalam prakteknya dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara umat Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam dengan demikian lebih didasarkan pada kondisi bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl merupakan perkara permohonan pengangkatan anak yang para pihaknya beragama Islam, hal tersebut tercantum dalam identitas para pemohon:

*“1. ACHMAD SUBECHI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. SITI FAYATUN, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,...selanjutnya disebut sebagai.....PARA PEMOHON”*

Ibu kandung (SUWARTINI) dari anak yang akan diangkat pun beragama Islam, hal tersebut terbukti dari akta cerai SUWARTINI di Pengadilan Agama yang dijadikan bukti surat dalam permohonan penetapan pengangkatan anak ini:

“Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-7 adalah Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1632/AC/2010/Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktoer 2010 berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor : 1240 / Pdt.G / 2010 / PA.Kdl tanggal 12 Oktober 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO.”

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, juga peraturan-perundangan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak, dengan demikian bunyi penetapan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keyakinan bagi umat Islam yang melakukan pengangkatan anak. Permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl diajukan agar anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik karena perekonomian dari orang tua angkat lebih baik dibanding orang tua kandungnya.

Pencantuman agama dalam identitas calon orang tua angkat dalam permohonan yang diajukan ke pengadilan agama sangat penting, demikian pula dengan agama anak angkat, karena akan berkaitan dengan tahap pemeriksaan dan putusan/penetapan. Ketentuan perundang-undangan telah menekankan pentingnya agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, karena mereka harus seagama, oleh karena itu, pencantuman agama pemohon dan agama calon anak angkat harus dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak.

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam pertimbangan Hakimnya tidak mencantumkan agama dari calon anak angkat dan ibu kandungnya, SEMA yang selama ini mengatur penerapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri lebih menekankan pada aspek kewarganegaraan dan anak yang berada dalam organisasi sosial tanpa memandang agama yang dianutnya, itu lah sebabnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak memasukkan dalam pertimbangannya

perihal agama tersebut, padahal hal ini sangat penting dan juga tertuang jelas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut menutup peluang terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, hal demikian adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dalam beribadah menurut agamanya.

f. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berarti dimana pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang diangkat.⁹⁴ SEMA Nomor 6 Tahun 1983 telah menegaskan hal tersebut.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-2 yang berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An. SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, dan An. SUWARTINI yang dikeluarkan di Kendal

⁹⁴ Rusli Pandika, *Op., Cit.*, hlm. 154.

tertanggal 23 Juni 2011, adalah KTP atas nama Para Pemohon dan KTP atas nama SUWARTINI selaku orang tua kandung dari anak yang akan diangkat.”

Berdasarkan pertimbangan Hakim dari bukti surat tersebut, dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kendal, sehingga seharusnya dalam hal ini lebih tepat menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak diajukan dan ditetapkan di Pengadilan Agama Kendal karena para pihak yang beragama Islam.

4. Pertimbangan Tentang Pembuktian

Suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran tersebut, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya.

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum, oleh karena itu, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiil. Islam pun mengemukakan pentingnya pembuktian, hal tersebut dibuktikan dari hadist Rasulullah saw.

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw pernah bersabda:

“jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat

mengingkarinya dengan sumpahnya.” H.R, Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.”

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara atau hukum formal berujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil, jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg dan HIR, sementara secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.⁹⁵

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum acara perdata mengandung beberapa pengertian, yang pertama membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*). Ketiga, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan.⁹⁶

⁹⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.101.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata ini dapat di temukan di Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg dimana bunyi pasal-pasal tersebut semakna, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu alat bukti dengan surat atau tertulis, alat bukti dengan saksi, alat bukti persangkaan-persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.⁹⁷ Macam-macam alat bukti tersebut di atas sebenarnya masih kurang karena dalam praktik persidangan masih ada bukti lain, yaitu bukti tentang pemeriksaan setempat dan bukti tentang keterangan saksi ahli.⁹⁸

Permohonan pengangkatan anak termasuk perkara *voluntair*. Proses pemeriksaan perkara *voluntair* berbeda dengan perkara *contentiosa* (gugatan), yakni bersifat sepihak (*ex parte*), hanya keterangan dan bukti pemohon dan tidak menerapkan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) atau asas memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity*) seperti dalam perkara gugatan. Pemeriksaan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang bersifat *voluntair* tidak ada jawaban, replik dan duplik. Pengadilan hanya mendengar keterangan pemohon dan/atau kuasanya sehubungan dengan permohonan tersebut dan memeriksa bukti serta saksi yang diajukan pemohon.

⁹⁷ Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 241.

⁹⁸ *Ibid.*

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl Para Pemohonnya bertindak sendiri tanpa kuasa dan telah memberikan bukti-bukti yang sah menurut Hakim, juga keterangan saksi yang diperlukan:

“Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Surat Pengantar Desa Kalire jo Nomor : 145/843/VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi, selanjutnya diberi tanda (P-1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/21/ IX/2001, atas nama ACHMAD SUBECHI dengan SITI FAYATUN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, tertanggal 23 September 2001, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1119 / 2011 tertanggal 27 Juni 2011 bahwa di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu, perempuan dari perempuan SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 4) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324170908084932 tertanggal 27 Juni 2011 atas nama ACHMAD SUBECHI , selanjutnya diberi tanda (P – 5) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324173220810003 tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 6) ;

Fotocopy AKTA CERAI Nomor : 1632/AC/2010/PA/Kdl , tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara : SUWARTINI binti SUWADI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO, selanjutnya diberi tanda (P - 7) ;

Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, penyerahan mana dilakukan secara sukarela, selanjutnya diberi tanda (P - 8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut di atas, diketahui bahwa Bukti bertanda P – 1 dan P – 8 adalah asli , sedangkan bukti bertanda P-2 s/d P-7 adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah, Saksi- Saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : NURHADI UTOMO:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon ;*
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tanggal 23 September 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;*
- Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;*
- Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI adalah SUWARTINI ;*
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada ikut Ibu kandung ;*
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sampai dengan sekarang;*
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;*
- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;*
- Bahwa penyerahan anak tersebut telah dilakukan secara adat dan diketahui oleh Saksi karena Saksi mengikuti acara selamatan pengajian yang diadakan oleh Para Pemohon di lingkungan RT nya;*

2. Saksi : S U R O N O :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena tetangga;*
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tahun 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;*

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

- Bahwa Ibu kandungnya bernama SUWARTINI yang tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;*
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada Ikut Ibu kandung ;*

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya;
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orangtua/Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;
- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di tengah-tengah masyarakat cukup baik;
- Bahwa secara adat telah dilakukan acara selamatan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon dalam rangka pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Para Saksi tersebut, juga telah dimintai keterangan orangtua/Ibu kandungnya ZASKIA NABILA PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Para Pemohon, Suwartini menyatakan sudah mengenal sejak lama, dan antar kedua keluarga Para Pemohon dan keluarga Suwartini pun ada hubungan baik;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada 23 September 2001, dan dari perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat anak perempuan dari perempuan yang bernama Suwartini yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Benar Ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI telah mengikhlaskan pengangkatan tersebut demi masa depan anak yang lebih baik, hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara SUWARTINI dengan ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN ;

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/Ibu kandung dari ZASKIA NABILA PUTRI, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;
- Bahwa ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI yang bernama Suwartini , sekarang sudah bercerai dengan suaminya tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara: SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO ;
- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa maksud dari pada penyerahan anak tersebut adalah agar anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih baik, dan dalam masyarakat telah diadakan acara selamatan/pengajian dalam rangka pengangkatan anak tersebut sesuai dengan adat masyarakat setempat;

- Bahwa benar, penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandung ZASKIA NABILA PUTRI dengan ikhlas, dan sukarela serta tidak ada tekanan / paksaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi diatas dan keterangan orangtua/Ibu kandung anak tersebut, serta menyatakan tetap pada permohonannya serta sudah tidak akan mengajukan hal- hal lain yang berkaitan dengan permohonan ini, dan mohon dikabulkannya

permohonan Para Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8, maka benar diperoleh fakta – fakta yuridis.”

Pemeriksaan permohonan pengangkatan anak tidak hanya mendengar keterangan pemohon, tetapi mendengar pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam SEMA. Pengadilan dalam memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak harus mendengar langsung calon orang tua angkat dan sedapat mungkin juga mendengar keluarga terdekat lainnya, bahkan apabila dipandang perlu dapat mendengar mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan calon anak angkat, selanjutnya Hakim juga perlu mendengar keterangan langsung dari orang tua sah/wali sah/keluarga yang merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut, jika anak yang berasal dari yayasan sosial maka mendengar dari badan sosial tersebut, Hakim juga perlu mendengar dari calon anak angkat jika menurut umurnya sudah bisa di ajak bicara dan mendengar langsung dari kepolisian setempat.

Menurut hemat Penulis, Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam hal memberikan alat bukti maupun saksi-saksi sudah memenuhi persyaratan materiil maupun formil, yaitu dalam Pasal 1905 KUHPdata yang menyatakan

keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, disini Para Pemohon mengajukan 2 saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata dimana maknanya adalah saksi-saksi tersebut memiliki pengetahuan atau dalam hal pengangkatan anak ini benar-benar mengenali Para Pemohon maupun sang ibu kandung dari calon anak angkat tersebut. Syarat formil yang telah dipenuhi Para Pemohon adalah mengajukan 2 saksi yang cakap menjadi saksi dan memberikan keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan.

5. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl

Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Indonesia adalah negara hukum yang menganut *civil law* sistem, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang pada Pokok Perkara.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu, dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.⁹⁹ *Ratio decidendi* dalam

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119.

Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl akan Penulis paparkan lebih rinci dalam bab ini untuk mengetahui apakah telah terpenuhi seluruhnya dalam perspektif prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak memiliki beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam hal pengangkatan anak untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak, seperti yang dijabarkan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB:

- a. Pandangan dan aspirasi anak.
- b. Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi.
- c. Perawatan, perlindungan dan keamanan anak.
- d. Kesejahteraan anak.
- e. Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga.
- f. Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa.
- g. Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan.
- h. Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang.
- i. Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan.
- j. Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.
- k. Kebutuhan lain yang spesifik.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), Bab V.A.1 dan par. 44.*

Menurut Penulis dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl terdapat parameter kepentingan terbaik bagi anak yang telah dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal, namun dalam penetapan tersebut juga ada beberapa hal krusial yang tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, berikut Penulis jabarkan satu persatu perihal tersebut:

Tabel 3: Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak

No	Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Pasal Dalam Undang-Undang	Pertimbangan Hakim	Keterangan
a.	Pandangan dan aspirasi anak	Pasal 56 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	- Bahwa benar, oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga Para Pemohon berniat mengangkat anak, agar kelak dikemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara Para Pemohon dihari tua, yang kedua demi kesejahteraan anak yang lebih baik di kemudian hari.	Pandangan dari Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat sudah sesuai karena pengangkatan anak tersebut demi kesejahteraan anak angkat agar lebih baik di kemudian hari
b.	Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi.	Pasal 27 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	- Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta Kelahiran Nomor 1119/2011, yang	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal sudah sesuai dari Bukti Surat yang telah diberikan oleh Para Pemohon.

			<p>dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Pada Tanggal 27 Juni 2011, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir Zaskia Nabila Putri anak ke satu, perempuan dari perempuan Suwartini.</p> <p>- Menimbang bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-6 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 33241322061100 03 an. Suwartini alamat Sidomulyo RT 002/003, Desa Sidomulyo, menerangkan bahwa Suwartini adalah Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Zaskia Nabila Putri, tanpa suami.</p>	
c.	Perawatan, perlindungan dan keamanan anak.	Pasal 1 angka 9 & 10 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	<p>- Menimbang bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari perempuan Suwartini, berjenis kelamin perempuan, yang telah diasuh,</p>	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

			dirawat dan dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri.	
d.	Kesejahteraan anak.	Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak	- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Hakim selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 12.	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e.	Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga.	Pasal 4 PP Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	- benar Ibu kandung Zaskia Nabila Putri telah mengikhlaskan pengangkatan anak tersebut demi masa depan anak yang lebih baik, hal mana dibuktikan	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 4 yang menetapkan bahwa

			dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara Suwartini dengan Achmad Subechi dan Siti Fayatun.	pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
f.	Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa.	Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	<p>- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.</p> <p>- Bahwa benar, penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandung Zaskia Nabila Putri dengan ikhlas, dan sukarela serta tidak ada tekanan/paksaan dari orang lain.</p>	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g.	Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan.	Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak	- Menimbang bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya .	Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan konsekuensi atau akibat hukum bagi orang tua angkat , karena para Pemohon mengajukan hak anak angkat sama seperti anak kandung, yaitu saling mewaris, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam yang

				<p>tidak membenarkan orang tua angkat dan anak angkat saling mewaris dan tidak sesuai dengan ketentuan</p> <p>Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang</p> <p>Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung.</p>
h.	Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang.	Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	<p>- Bahwa kondisi sosial ekonomi para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/ibu kandung dari Zaskia Nabila Putri, sehingga para pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut.</p> <p>- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga</p>	<p>Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

			mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.	
i.	Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan.	Pasal 9 (pendidikan) dan Pasal 44 (kesehatan) Undang-Undang Perlindungan Anak	- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak	Dalam pertimbangan Hakim, memang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk perihal kebutuhan kesehatan dan pendidikan, namun untuk perihal hak anak tidak dijabarkan lebih lanjut oleh Hakim , maksud Penulis disini adalah perihal hak mewaris yang mana antara orang tua kandung dan anak kandung tidak boleh saling mewaris.

			tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.	
j.	Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.	Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak	- Bahwa kondisi sosial ekonomi para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/ibu kandung dari Zaskia Nabila Putri, sehingga para pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut.	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
k.	Kebutuhan lain yang spesifik	Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak	- Menimbang bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya .	Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan konsekuensi atau akibat hukum bagi orang tua angkat , karena para Pemohon mengajukan hak anak angkat sama seperti anak kandung, yaitu saling mewaris, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam yang tidak membenarkan orang tua angkat dan anak angkat saling mewaris dan tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

				Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung.
--	--	--	--	--

Lebih jelasnya tentang *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nomor:
27/Pdt.p/2011/PN. Kdl selanjutnya akan Penulis jabarkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah pula dilakukan menurut cara-cara / kebiasaan-kebiasaan setempat, maka dilihat dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku telah bersesuaian dengan norma adat yang berlaku di desa Para Pemohon;

Dasar pertimbangan yang diberikan hakim merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat, namun oleh hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis sangat penting untuk disampaikan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara

anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, dari ketentuan tersebut terlihat ada pengaruh hukum Islam walaupun di belakangnya terdapat frasa “...berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Tidak ada penjelasan mengenai frasa tersebut, apakah hukum adat atau hukum agama dari anak angkat, apabila yang dimaksudkan adalah hukum agama, maka dengan sendirinya berlaku ketentuan hukum Islam terhadapnya. Pengaruh ketentuan berdasarkan hukum Islam yang dimaksud oleh Penulis adalah prinsip hukum Islam mengenai *nasab*, dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.

Ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya, namun satu hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan-ketentuan di atas, baik menurut UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, tidak satupun mengatur mengenai akibat hukum terhadap pewarisan. Pengaturannya hanya bersifat umum yaitu dengan ditambahkan frasa “...menurut hukum...”, bahkan bukan “..menurut hukum agama...”.

Pertimbangan Hakim selanjutnya:

Menimbang, bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak ke - 1 (satu) dari perempuan SUWARTINI, berjenis kelamin perempuan, yang telah

diasuh, dirawat dan dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri ;

*Menimbang, bahwa dari **fakta- fakta hukum** yang diperoleh Hakim selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya”;*

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undnag-Undang Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak bahwa:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak bahwa:

“orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa sementara itu Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 - nya disebutkan bahwa “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku” . Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Bab I. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab I. Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang- undangan dan adat kebiasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri , sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa ;

Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, oleh karena itu

alangkah baiknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya ;

Menurut analisis Penulis, Pengadilan menyebutkan bahwa para pemohon telah mengetahui akibat hukum dari pangangkatan anak, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah akibat hukumnya, dari sisi Pemohon justru mengajukan:

Para Pemohon telah menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.

Menurut Penulis, pengangkatan anak dalam Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibat dari ketentuan hukum ini juga meliputi mengenai hak anak angkat atas pewarisan, bahwa dengan

kedudukannya tersebut anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris. Anak angkat hanya akan mewaris dari pewarisnya yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah, bahkan wasiat wajibah, oleh karenanya akan lebih baik jika ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim dan menjelaskan kembali kepada Para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang dimaksud dan dituangkan dalam penetapannya, dengan merujuk kepada akibat hukumnya.

Hal tersebut juga tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hal hak-hak anak yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada point e, g, i dan k, namun dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. ini secara otomatis hak mengenai harta waris dan nasab berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat, hal tersebut terjadi karena pengajuan dari para pemohon yang mengajukan anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dalam hal waris, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjelaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disinggung sebelumnya, karena para pemohon beragama Islam maka seharusnya berlaku hukum Islam.

Jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan nasabnya, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.

Prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri, dan sudah barang tentu hal ini menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut Islam, sementara pemohon beragama Islam. Hakim sebenarnya dalam hal ini bisa menjelaskan kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. Menurut hemat Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan

anak yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Kendal sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan Nasional yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya jelas sekali bahwa penetapan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya dan tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa:

Permohonan Pengangkatan Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan ;

Pengadilan menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ke instansi terkait;

Berdasarkan Pasal 49 jo. penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Para Pemohon saat melakukan hubungan hukum beragama Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang menetapkan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara penetapan anak yang termasuk dalam bidang hukum Perkawinan tersebut dalam Pasal 49 Undang-

Undang Peradilan Agama, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan namun di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal-pasalanya tidak menyinggung tentang anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa undang-undang yang terkait dengan pengangkatan anak, misalnya Undang-Undang Peradilan Agama pun tidak pula memberikan pengertian tentang anak angkat atau pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama pun hanya memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h. Pengertian angkat anak dalam Kompilasi Hukum Islam ini masuk dalam subbab kewarisan yang mengatur tentang wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat maupun sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 209.

Kompilasi Hukum Islam adalah acuan utama bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tentang perkawinan dan pengangkatan anak termasuk di dalamnya sesuai dengan latar belakang dirumuskannya kedua peraturan tersebut, dimana sebelum masa kemerdekaan Indonesia belum ada peraturan khusus bagi rakyat bumi putera beragama Islam, tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari

¹⁰¹ Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

masa ke masa. Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya, karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁰²

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundat-undangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.¹⁰³

¹⁰² Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

¹⁰³ *Ibid.*

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial peradilan agama.¹⁰⁴ Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan Pengadilan Agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

¹⁰⁴ Basiq Jalil, **Pengadilan Agama di Indonesia**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 109.

Dasar legalitas berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah intruksi presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.¹⁰⁵

Undang-Undang Peradilan Agama yang seharusnya sudah berlaku namun Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan penetapan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl adalah dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada prosedur pengangkatan anak. Alasan dari tidak adanya peraturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam yang telah dipositifkan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi alasan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan pengangkatan anak beragama Islam, namun sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁶

Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yang pertama, yaitu aspek negatif (*het negatieve*

¹⁰⁵ Abdul Halim, **Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi**, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 259.

¹⁰⁶ Musthofa, **Op.Cit.**, hlm. 60.

aspect), aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*), aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹⁰⁷

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁸

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, namun juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal menganut prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip kedua yang digunakan oleh Hakim adalah prinsip *jus*

¹⁰⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 58.

curia novit yang mengandung makna dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹⁰⁹ Adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban Hakim agar benar-benar mengadili perkara perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum, namun bagaimanapun luasnya pengalaman seorang Hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks, seperti dalam perkara Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl ini, Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. **Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri.** Permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl diajukan pada tahun 2011, yang berarti Undang-Undang Peradilan Agama sudah diberlakukan selama hampir 5 (lima) tahun, saat Pengadilan Negeri Kendal menerima permohonan tersebut.

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri telah disebutkan sebelumnya, bahwa batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, yang menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex*

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 821.

generalis, dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas *lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. **Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.**¹¹⁰

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 ditetapkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (1) bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

¹¹⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 98.

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan anak yang akan diangkat yaitu ZASKIA NABILA PUTRI telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II , yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelaksanaan Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

C. Keabsahan Status Anak Angkat Atas Dikabulkannya Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Beragama Islam Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl Oleh Pengadilan Negeri Kendal Berperspektif Hukum Administrasi Negara

Nilai Putusan atau Penetapan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak bersifat konstitutif, karena Penetapan atau Putusan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, yang mana sangat tergantung dari Pengadilan mana yang menetapkan pengesahan pengangkatan anak.¹¹¹ Sahnya penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam, dan agar tetap mengikuti ketentuan hukum Allah SWT terkait dengan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

¹¹¹ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 120.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*),
2. Kekuatan bukti (*Bewijsende Kracht*),
3. Kekuatan untuk dilaksanakan (*Executoriale Kracht*).¹¹²

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangat berbeda. Seperti yang telah di singgung sebelumnya, harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang anaknya akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan ditetapkan Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan ditetapkan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan peraturan pengangkatan anak yang bersifat umum tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹¹³

Islam hanya mengakui dan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam arti status keluarganya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua

¹¹² Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia**, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 82.

¹¹³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Op.Cit.**, hlm. 8.

kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah swt.¹¹⁴ Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.¹¹⁵

Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor:

¹¹⁴ Andi Syamsu, M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹¹⁵ *Ibid.*

27/Pdt.p/2011/PN. Kdl menurut Penulis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena penetapan tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga yang berhak memutus perkara adalah Hakim Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex generalis*, dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas *lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.¹¹⁶

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum

¹¹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yang pertama, yaitu aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*), aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹¹⁷

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹¹⁸

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dengan

¹¹⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 58.

dikeluarkannya produk penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam maka penekanannya lebih kepada melindungi anak angkat dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab dari orang tua angkatnya atas pemeliharaan dirinya sebagai anak yang telah diangkat dalam keluarga orang tua angkatnya. Peranan Pengadilan Agama menjadi jelas bahwa dalam menetapkan anak angkat adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat, sehingga hak-hak anak angkat sebagai seorang anak dan sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya lebih terjamin.

Dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. yang diberikan Hakim merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat, namun oleh Hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis penting untuk disampaikan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Hubungan darah disini adalah mengenai nasab, dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.

Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum terhadap hak anak angkat yang beragama Islam dapat berbeda sama sekali. Terhadap kedudukannya, mereka berkedudukan sebagaimana layaknya kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya, mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak kandung sehingga dampaknya adalah terhadap hak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Putusan hakim bisa berakibat dua hal, yaitu memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat atau tidak memberikan sama sekali, karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam, sekalipun para pihak berperkara beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, jika dikaitkan dengan perlindungan anak, maka pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam Undang-Undang Peradilan Agama, pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, hal tersebut tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat mengenai kedudukannya dalam keluarga angkatnya termasuk hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagai anak angkat.

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak, padahal dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya yang pertama dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Kedua, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.”

Ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Pasal-pasal di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

Jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan nasabnya, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.¹¹⁹

Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak tersebut.

Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri, hal ini sudah barang tentu menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, sementara pemohon beragama Islam.

Menurut Bachsan Mustafa, kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yang pertama, yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah

¹¹⁹ Andi Syamsu, M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.¹²⁰

Penetapan tentang pengangkatan anak harus pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara, karena kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Hakim dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl seharusnya bisa menjelaskan kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

Mengenai penetapan pengangkatan anak yang sudah terlanjur dikabulkan maka dalam hukum acara dikenal adanya asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.¹²¹ Sudikno menjelaskan bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai

¹²⁰ Bachsan Mustafa, *Loc. Cit.*

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 7.

memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).¹²²

Asas ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini, oleh karenanya kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, seperti halnya sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat mutlak, walaupun ada indikasi *judicial corruption*, daya berlaku sifat final dan mengikat itu tidak berkurang, maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya, namun berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Agama maka Penetapan Pengangkatan Anak Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena Pengadilan Negeri Kendal melanggar batas yurisdiksi kewenangan absolutnya maka sebaiknya Para Pemohon mengajukan ulang untuk pengangkatan anak ini agar hak-hak anak angkat maupun orang tua angkat bisa lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan hukum Islam.

Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah mencari hakim lain yang lebih tinggi kedudukannya, untuk memutuskan kembali, dalam hal ini dikenal ada lembaga pengadilan tingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Putusan hakim

¹²² *Ibid*, hlm. 9.

harus dikalahkan oleh putusan hakim juga, bukan oleh produk hukum lainnya. Pada titik ini terlihat bahwa kebenaran yang dikejar akhirnya harus tunduk pada formalitas di dalam hukum, bahwa putusan hakim merupakan sesuatu yang perlu dipastikan kebenarannya, semata-mata karena hukum juga mengejar kepastian.

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Maka terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.¹²³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

Lebih lanjut penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

“Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.”

Memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi. Tidak ada atau tidak dikenal upaya hukum di dalam permohonan. Permohonan yang tidak

¹²³ Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 42.

diterima, misalnya, menyangkut masalah kompetensi pengadilan maka dapat diajukan kembali kepada pengadilan lain yang berwenang.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 123.

BAB IV

RATIO DECIDENDI HAKIM DAN KEABSAHAN STATUS ANAK ANGKAT BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

A. Posisi Kasus Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl⁸⁰

Sub bab ini Peneliti akan memaparkan posisi kasus dari Penetapan Pengangkatan Anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl, dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh BUDI HARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Pemohon dalam perkara pengangkatan anak ini adalah ACHMAD SUBECHI, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan SITI FAYATUN, umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang selanjutnya disebut Pemohon, keduanya adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2001 di KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 6 Juli 2011 di bawah register Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dan mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa selama pernikahan yaitu kurang lebih 10 tahun, para Pemohon tidak dikaruniai anak. Didorong oleh rasa keinginan untuk mempunyai anak, maka pada tanggal 13 Juni 2011, para Pemohon telah mengangkata seorang anak perempuan bernama: ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak dari seorang ibu yang bernama SUWARTINI. Anak tersebut telah diasuh/dipelihara oleh para pemohon sejak anak tersebut lahir dan diperlakukan seperti anak kandung. Pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Desa setempat, maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah demi masa depan anak agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Untuk mmpерkuat pengangkatan anak ini maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan

⁸⁰ Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl.

ini dan selanjutnya setelah Para Pemohon dipanggil serta didengar keterangannya, selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu yang bernama SUWARTINI.
3. Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Para Pemohon benar-benar telah sepakat berkeinginan mengangkat seorang anak dan berharap di kemudian hari anak tersebut dapat menjaga dan memelihara pemohon di hari tua, serta demi kesejahteraan anak yang lebih baik di kemudian hari. Para Pemohon telah menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.

Pemohon telah mengambil anak tersebut dari orang tuanya sejak lahir sampai sekarang dan pada waktu mengambil anak tersebut dan pemohon telah melakukan secara adat, telah pemohon selamati dengan mengundang para tetangga dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Pengantar Desa Kalirejo Nomor : 145/843/VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi, fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 257/21/ IX/2001, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1119 / 2011 tertanggal 27 Juni 2011 bahwa di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu, perempuan dari perempuan SUWARTINI dan dokumen surat lainnya serta Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, penyerahan mana dilakukan secara sukarela. Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 saksi yang telah disumpah serta keterangan dari ibu Kandung dari ZASKIA NABILA PUTRI.

Pertimbangan Hakim setelah memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan para pihak selanjutnya mempertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah pula dilakukan menurut cara-cara/kebiasaan-kebiasaan setempat, maka dilihat dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku telah bersesuaian dengan norma adat yang berlaku di desa Para Pemohon. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya.” Berdasarkan Pasal 1

angka 2 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 - nya disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Bab I. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab I. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Para Pemohon setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya.

Penetapan Pengadilan Negeri Kendal:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut.
2. Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu yang bernama SUWARTINI.
3. Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
4. M
 embebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

B. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Kendal (Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl) Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dalam Perspektif Prinsip Perlindungan Anak

1. Dasar Hukum

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl merupakan permohonan pengangkatan anak. Dasar hukum hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Dasar hukum Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 2:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ditegaskan pula tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49, yakni:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*

- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah."*

Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yaitu:

"Pasal 49 Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1. izin beristri lebih dari seorang;*
- 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;*
- 3. dispensasi kawin;*
- 4. pencegahan perkawinan;*
- 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 6. pembatalan perkawinan;*
- 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;*
- 8. perceraian karena talak;*
- 9. gugatan perceraian;*
- 10. penyelesaian harta bersama;*
- 11. penguasaan anak-anak;*

12. *ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;*
13. *penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;*
14. *putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
15. *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
16. *pencabutan kekuasaan wali;*
17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*
19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain."*

2. Pertimbangan Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan

pengadilan.⁸¹ Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak, yang pertama, yakni tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentieus* (*contentieus jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya. Kedua, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.⁸²

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, kemudian permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga, selanjutnya, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan,

⁸¹ Harjono, **Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

⁸² Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan *hukum* (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.⁸³

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak belum sepenuhnya mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur, syarat-syarat pengangkatan anak dan permohonan penegasan pengangkatan anak ini telah diatur dalam SEMA tersebut.

Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti SEMA yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa permohonan adalah perkara perdata yang terdiri atas satu pihak saja, yaitu pemohon sendiri, jadi tidak ada pihak lawan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada atau tidak dikenal upaya hukum

⁸³ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 29.

di dalam permohonan. Permohonan yang tidak diterima, misalnya, menyangkut masalah kompetensi pengadilan maka dapat diajukan kembali kepada pengadilan lain yang berwenang.⁸⁴

Mengajukan permohonan pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan-perundangan di Indonesia. Secara umum syarat-syarat pengangkatan anak bisa dilakukan terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki, seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Pengangkatan anak kembar dikecualikan dan dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.⁸⁵

Para calon orang tua angkat pada umumnya akan mengangkat anak yang masih bayi, namun tidak menutup kemungkinan ada pasangan suami isteri yang mengangkat anak yang sudah beranjak dewasa. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat calon anak angkat dalam Pasal 12, yakni:

“Syarat anak yang akan diangkat meliputi :

- a. Belum berusia 18 tahun,*
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,*
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan*
- d. Memerlukan perlindungan khusus.”*

Pasal 13, menentukan :

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:”

- a. “Sehat jasmani dan rohani,*
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,*
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 123.

⁸⁵ Rusli Pandika, hlm 117.

- d. *Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan,*
- e. *Berstatus menikah paling singkat 5 tahun,*
- f. *Tidak merupakan pasangan sejenis,*
- g. *Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,*
- h. *Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,*
- i. *Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,*
- j. *Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,*
- k. *Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,*
- l. *Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan*
- m. *Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi sosial.”*

Menyimpang dari syarat bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah tersebut di atas, bagi pengangkatan anak antar WNI masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, yaitu sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.*
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.*

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, yang dimaksud lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam pertimbangan hukumnya:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.”

“Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan anak yang akan diangkat yaitu ZASKIA NABILA PUTRI telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud.”

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan,”

Para Pemohon dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl adalah para pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan pengangkatan anak ini karena telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon orang tua angkat bagi anak angkat tersebut karena agama yang sama, yaitu agama Islam dan memenuhi persyaratan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf c, serta memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan. Seseorang dapat menjadi sah dalam berperkara di pengadilan jika memenuhi persyaratan, yaitu mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara, cakap bertindak hukum, telah dewasa atau telah cukup umur, tidak berada di bawah pengampuan.⁸⁶

Pihak yang dianggap tidak mampu dalam berperkara adalah mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka yang sakit ingatan dan mereka

⁸⁶ Mukti Arto, **Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 32.

yang telah meninggal dunia.⁸⁷ Para Pemohon dalam permohonannya dapat dipastikan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara permohonan pengangkatan anak tersebut dan dapat dilihat dari identitas Para Pemohon yang telah cukup umur, tidak sakit ingatan, juga masih dalam keadaan hidup, maka sudah tentu dapat berperkara di pengadilan.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak beragama Islam

Hakim dalam memutuskan perkara terbagi menjadi 2 kewenangan/kompetensi dalam mensahkan pengangkatan anak seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yang pertama, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Berikut akan Penulis jabarkan mengenai 2 (dua) kompetensi tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam.

e. Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut/mutlak atau *absolute competentie* adalah kewenangan absolut pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.⁸⁸ Menurut Retnowulan wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam

⁸⁷ Soeroso, **Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

⁸⁸ Zainal Asikin, **Op., Cit.**, hlm. 83.

pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.⁸⁹

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Kewenangan absolut Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁹⁰

Kompetensi absolut Pengadilan Agama secara normatif, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 49, salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut adalah tentang

⁸⁹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op., Cit.*, hlm. 11.

⁹⁰ Roihan A. Rasyid, *Op., Cit.*, hlm. 27.

perkawinan. Pengangkatan anak menjadi subbidang perkawinan berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-Undang tersebut, yakni penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Ada dua pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama. Pandangan pertama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pengangkatan anak. Badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan Undang-Undang menjadi wewenang badan peradilan.⁹¹

Kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Agama sebagai wewenang Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.

Menurut pandangan pertama tersebut bahwa dasar kewenangan mengadili tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara implisit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak.

⁹¹ Mustofa Sy, *Op.Cit.*, hlm. 65.

Pendapat kedua, memandang Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya merujuk Pasal 26 ayat (1) undang-undang yang sama, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah dalam hukum Islam.⁹²

Menurut pandangan Wantjik Saleh, mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dimana permohonan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan macam itu.⁹³ Pandangan beliau sejalan dengan pandangan kedua yang telah diuraikan sebelumnya.

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama, yang mana dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut secara tegas menentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil

⁹² *Ibid*, hlm. 66.

⁹³ K. Wantjik Saleh, **Hukum Acara Perdata RBg/HIR**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 105.

yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang perkara perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam dalam prakteknya dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara umat Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Dasar berlakunya Kompilasi Hukum Islam dengan demikian lebih didasarkan pada kondisi bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl merupakan perkara permohonan pengangkatan anak yang para pihaknya beragama Islam, hal tersebut tercantum dalam identitas para pemohon:

*“1. ACHMAD SUBECHI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. SITI FAYATUN, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,...selanjutnya disebut sebagai.....PARA PEMOHON”*

Ibu kandung (SUWARTINI) dari anak yang akan diangkat pun beragama Islam, hal tersebut terbukti dari akta cerai SUWARTINI di Pengadilan Agama yang dijadikan bukti surat dalam permohonan penetapan pengangkatan anak ini:

“Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-7 adalah Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1632/AC/2010/Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktoer 2010 berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor : 1240 / Pdt.G / 2010 / PA.Kdl tanggal 12 Oktober 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO.”

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, juga peraturan-perundangan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak, dengan demikian bunyi penetapan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keyakinan bagi umat Islam yang melakukan pengangkatan anak. Permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl diajukan agar anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik karena perekonomian dari orang tua angkat lebih baik dibanding orang tua kandungnya.

Pencantuman agama dalam identitas calon orang tua angkat dalam permohonan yang diajukan ke pengadilan agama sangat penting, demikian pula dengan agama anak angkat, karena akan berkaitan dengan tahap pemeriksaan dan putusan/penetapan. Ketentuan perundang-undangan telah menekankan pentingnya agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, karena mereka harus seagama, oleh karena itu, pencantuman agama pemohon dan agama calon anak angkat harus dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak.

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam pertimbangan Hakimnya tidak mencantumkan agama dari calon anak angkat dan ibu kandungnya, SEMA yang selama ini mengatur penerapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri lebih menekankan pada aspek kewarganegaraan dan anak yang berada dalam organisasi sosial tanpa memandang agama yang dianutnya, itu lah sebabnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak memasukkan dalam pertimbangannya

perihal agama tersebut, padahal hal ini sangat penting dan juga tertuang jelas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut menutup peluang terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, hal demikian adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dalam beribadah menurut agamanya.

f. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berarti dimana pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang diangkat.⁹⁴ SEMA Nomor 6 Tahun 1983 telah menegaskan hal tersebut.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-2 yang berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An. SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, dan An. SUWARTINI yang dikeluarkan di Kendal

⁹⁴ Rusli Pandika, *Op., Cit.*, hlm. 154.

tertanggal 23 Juni 2011, adalah KTP atas nama Para Pemohon dan KTP atas nama SUWARTINI selaku orang tua kandung dari anak yang akan diangkat.”

Berdasarkan pertimbangan Hakim dari bukti surat tersebut, dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kendal, sehingga seharusnya dalam hal ini lebih tepat menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak diajukan dan ditetapkan di Pengadilan Agama Kendal karena para pihak yang beragama Islam.

4. Pertimbangan Tentang Pembuktian

Suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan, yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran tersebut, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya.

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum, oleh karena itu, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiil. Islam pun mengemukakan pentingnya pembuktian, hal tersebut dibuktikan dari hadist Rasulullah saw.

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw pernah bersabda:

“jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat

mengingkarinya dengan sumpahnya.” H.R, Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih.”

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara atau hukum formal berujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil, jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg dan HIR, sementara secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.⁹⁵

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum acara perdata mengandung beberapa pengertian, yang pertama membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*). Ketiga, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan.⁹⁶

⁹⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.101.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata ini dapat di temukan di Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg dimana bunyi pasal-pasal tersebut semakna, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu alat bukti dengan surat atau tertulis, alat bukti dengan saksi, alat bukti persangkaan-persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.⁹⁷ Macam-macam alat bukti tersebut di atas sebenarnya masih kurang karena dalam praktik persidangan masih ada bukti lain, yaitu bukti tentang pemeriksaan setempat dan bukti tentang keterangan saksi ahli.⁹⁸

Permohonan pengangkatan anak termasuk perkara *voluntair*. Proses pemeriksaan perkara *voluntair* berbeda dengan perkara *contentiosa* (gugatan), yakni bersifat sepihak (*ex parte*), hanya keterangan dan bukti pemohon dan tidak menerapkan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) atau asas memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity*) seperti dalam perkara gugatan. Pemeriksaan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang bersifat *voluntair* tidak ada jawaban, replik dan duplik. Pengadilan hanya mendengar keterangan pemohon dan/atau kuasanya sehubungan dengan permohonan tersebut dan memeriksa bukti serta saksi yang diajukan pemohon.

⁹⁷ Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 241.

⁹⁸ *Ibid.*

Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl Para Pemohonnya bertindak sendiri tanpa kuasa dan telah memberikan bukti-bukti yang sah menurut Hakim, juga keterangan saksi yang diperlukan:

“Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Surat Pengantar Desa Kalire jo Nomor : 145/843/VI /2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi, selanjutnya diberi tanda (P-1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/21/ IX/2001, atas nama ACHMAD SUBECHI dengan SITI FAYATUN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, tertanggal 23 September 2001, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1119 / 2011 tertanggal 27 Juni 2011 bahwa di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu, perempuan dari perempuan SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 4) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324170908084932 tertanggal 27 Juni 2011 atas nama ACHMAD SUBECHI , selanjutnya diberi tanda (P – 5) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324173220810003 tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 6) ;

Fotocopy AKTA CERAI Nomor : 1632/AC/2010/PA/Kdl , tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara : SUWARTINI binti SUWADI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO, selanjutnya diberi tanda (P - 7) ;

Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, penyerahan mana dilakukan secara sukarela, selanjutnya diberi tanda (P - 8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut di atas, diketahui bahwa Bukti bertanda P – 1 dan P – 8 adalah asli , sedangkan bukti bertanda P-2 s/d P-7 adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah, Saksi- Saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : NURHADI UTOMO:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon ;*
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tanggal 23 September 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;*
- Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;*
- Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI adalah SUWARTINI ;*
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada ikut Ibu kandung ;*
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sampai dengan sekarang;*
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;*
- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;*
- Bahwa penyerahan anak tersebut telah dilakukan secara adat dan diketahui oleh Saksi karena Saksi mengikuti acara selamatan pengajian yang diadakan oleh Para Pemohon di lingkungan RT nya;*

2. Saksi : S U R O N O :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena tetangga;*
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tahun 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;*

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

- Bahwa Ibu kandungnya bernama SUWARTINI yang tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;*
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada Ikut Ibu kandung ;*

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya;

- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orangtua/Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;

- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di tengah-tengah masyarakat cukup baik;

- Bahwa secara adat telah dilakukan acara selamatan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon dalam rangka pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Para Saksi tersebut, juga telah dimintai keterangan orangtua/Ibu kandungnya ZASKIA NABILA PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Para Pemohon, Suwartini menyatakan sudah mengenal sejak lama, dan antar kedua keluarga Para Pemohon dan keluarga Suwartini pun ada hubungan baik;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada 23 September 2001, dan dari perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat anak perempuan dari perempuan yang bernama Suwartini yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Benar Ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI telah mengikhlaskan pengangkatan tersebut demi masa depan anak yang lebih baik, hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara SUWARTINI dengan AHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN ;

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/Ibu kandung dari ZASKIA NABILA PUTRI, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;

- Bahwa ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI yang bernama Suwartini , sekarang sudah bercerai dengan suaminya tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara: SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO ;

- Bahwa sikap dan peri laku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;

- Bahwa maksud dari pada penyerahan anak tersebut adalah agar anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih baik, dan dalam masyarakat telah diadakan acara selamatan/pengajian dalam rangka pengangkatan anak tersebut sesuai dengan adat masyarakat setempat;

- Bahwa benar, penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandung ZASKIA NABILA PUTRI dengan ikhlas, dan sukarela serta tidak ada tekanan / paksaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi diatas dan keterangan orangtua/Ibu kandung anak tersebut, serta menyatakan tetap pada permohonannya serta sudah tidak akan mengajukan hal- hal lain yang berkaitan dengan permohonan ini, dan mohon dikabulkannya

permohonan Para Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8, maka benar diperoleh fakta – fakta yuridis.”

Pemeriksaan permohonan pengangkatan anak tidak hanya mendengar keterangan pemohon, tetapi mendengar pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam SEMA. Pengadilan dalam memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak harus mendengar langsung calon orang tua angkat dan sedapat mungkin juga mendengar keluarga terdekat lainnya, bahkan apabila dipandang perlu dapat mendengar mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan calon anak angkat, selanjutnya Hakim juga perlu mendengar keterangan langsung dari orang tua sah/wali sah/keluarga yang merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut, jika anak yang berasal dari yayasan sosial maka mendengar dari badan sosial tersebut, Hakim juga perlu mendengar dari calon anak angkat jika menurut umurnya sudah bisa di ajak bicara dan mendengar langsung dari kepolisian setempat.

Menurut hemat Penulis, Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl dalam hal memberikan alat bukti maupun saksi-saksi sudah memenuhi persyaratan materiil maupun formil, yaitu dalam Pasal 1905 KUHPdata yang menyatakan

keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, disini Para Pemohon mengajukan 2 saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara dimana maknanya adalah saksi-saksi tersebut memiliki pengetahuan atau dalam hal pengangkatan anak ini benar-benar mengenali Para Pemohon maupun sang ibu kandung dari calon anak angkat tersebut. Syarat formil yang telah dipenuhi Para Pemohon adalah mengajukan 2 saksi yang cakap menjadi saksi dan memberikan keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan.

5. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl

Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Indonesia adalah negara hukum yang menganut *civil law* sistem, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang pada Pokok Perkara.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu, dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.⁹⁹ *Ratio decidendi* dalam

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119.

Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl akan Penulis paparkan lebih rinci dalam bab ini untuk mengetahui apakah telah terpenuhi seluruhnya dalam perspektif prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak memiliki beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam hal pengangkatan anak untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak, seperti yang dijabarkan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB:

- a. Pandangan dan aspirasi anak.
- b. Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi.
- c. Perawatan, perlindungan dan keamanan anak.
- d. Kesejahteraan anak.
- e. Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga.
- f. Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa.
- g. Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan.
- h. Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang.
- i. Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan.
- j. Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.
- k. Kebutuhan lain yang spesifik.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), Bab V.A.1 dan par. 44.*

Menurut Penulis dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl terdapat parameter kepentingan terbaik bagi anak yang telah dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal, namun dalam penetapan tersebut juga ada beberapa hal krusial yang tidak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, berikut Penulis jabarkan satu persatu perihal tersebut:

Tabel 3: Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak

No	Parameter Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Pasal Dalam Undang-Undang	Pertimbangan Hakim	Keterangan
a.	Pandangan dan aspirasi anak	Pasal 56 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	- Bahwa benar, oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga Para Pemohon berniat mengangkat anak, agar kelak dikemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara Para Pemohon dihari tua, yang kedua demi kesejahteraan anak yang lebih baik di kemudian hari.	Pandangan dari Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat sudah sesuai karena pengangkatan anak tersebut demi kesejahteraan anak angkat agar lebih baik di kemudian hari
b.	Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi.	Pasal 27 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	- Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta Kelahiran Nomor 1119/2011, yang	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal sudah sesuai dari Bukti Surat yang telah diberikan oleh Para Pemohon.

			<p>dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Pada Tanggal 27 Juni 2011, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir Zaskia Nabila Putri anak ke satu, perempuan dari perempuan Suwartini.</p> <p>- Menimbang bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-6 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 33241322061100 03 an. Suwartini alamat Sidomulyo RT 002/003, Desa Sidomulyo, menerangkan bahwa Suwartini adalah Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Zaskia Nabila Putri, tanpa suami.</p>	
c.	Perawatan, perlindungan dan keamanan anak.	Pasal 1 angka 9 & 10 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	<p>- Menimbang bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari perempuan Suwartini, berjenis kelamin perempuan, yang telah diasuh,</p>	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

			dirawat dan dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri.	
d.	Kesejahteraan anak.	Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak	- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Hakim selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 12.	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e.	Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga.	Pasal 4 PP Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	- benar Ibu kandung Zaskia Nabila Putri telah mengikhlaskan pengangkatan anak tersebut demi masa depan anak yang lebih baik, hal mana dibuktikan	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 4 yang menetapkan bahwa

			dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara Suwartini dengan Achmad Subechi dan Siti Fayatun.	pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
f.	Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa.	Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	<p>- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.</p> <p>- Bahwa benar, penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandung Zaskia Nabila Putri dengan ikhlas, dan sukarela serta tidak ada tekanan/paksaan dari orang lain.</p>	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g.	Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan.	Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak	- Menimbang bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya .	Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan konsekuensi atau akibat hukum bagi orang tua angkat , karena para Pemohon mengajukan hak anak angkat sama seperti anak kandung, yaitu saling mewaris, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam yang

				<p>tidak membenarkan orang tua angkat dan anak angkat saling mewaris dan tidak sesuai dengan ketentuan</p> <p>Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang</p> <p>Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung.</p>
h.	Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang.	Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	<p>- Bahwa kondisi sosial ekonomi para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/ibu kandung dari Zaskia Nabila Putri, sehingga para pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut.</p> <p>- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga</p>	<p>Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

			mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.	
i.	Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan.	Pasal 9 (pendidikan) dan Pasal 44 (kesehatan) Undang-Undang Perlindungan Anak	- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak	Dalam pertimbangan Hakim, memang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk perihal kebutuhan kesehatan dan pendidikan, namun untuk perihal hak anak tidak dijabarkan lebih lanjut oleh Hakim , maksud Penulis disini adalah perihal hak mewaris yang mana antara orang tua kandung dan anak kandung tidak boleh saling mewaris.

			tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa.	
j.	Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen.	Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak	- Bahwa kondisi sosial ekonomi para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua/ibu kandung dari Zaskia Nabila Putri, sehingga para pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut.	Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
k.	Kebutuhan lain yang spesifik	Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak	- Menimbang bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya .	Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan konsekuensi atau akibat hukum bagi orang tua angkat , karena para Pemohon mengajukan hak anak angkat sama seperti anak kandung, yaitu saling mewaris, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam yang tidak membenarkan orang tua angkat dan anak angkat saling mewaris dan tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

				Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung.
--	--	--	--	--

Lebih jelasnya tentang *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl selanjutnya akan Penulis jabarkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah pula dilakukan menurut cara-cara / kebiasaan-kebiasaan setempat, maka dilihat dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku telah bersesuaian dengan norma adat yang berlaku di desa Para Pemohon;

Dasar pertimbangan yang diberikan hakim merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat, namun oleh hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis sangat penting untuk disampaikan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara

anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, dari ketentuan tersebut terlihat ada pengaruh hukum Islam walaupun di belakangnya terdapat frasa “...berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Tidak ada penjelasan mengenai frasa tersebut, apakah hukum adat atau hukum agama dari anak angkat, apabila yang dimaksudkan adalah hukum agama, maka dengan sendirinya berlaku ketentuan hukum Islam terhadapnya. Pengaruh ketentuan berdasarkan hukum Islam yang dimaksud oleh Penulis adalah prinsip hukum Islam mengenai *nasab*, dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.

Ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya, namun satu hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan-ketentuan di atas, baik menurut UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, tidak satupun mengatur mengenai akibat hukum terhadap pewarisan. Pengaturannya hanya bersifat umum yaitu dengan ditambahkan frasa “...menurut hukum...”, bahkan bukan “..menurut hukum agama...”.

Pertimbangan Hakim selanjutnya:

Menimbang, bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak ke - 1 (satu) dari perempuan SUWARTINI, berjenis kelamin perempuan, yang telah

diasuh, dirawat dan dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri ;

*Menimbang, bahwa dari **fakta- fakta hukum** yang diperoleh Hakim selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya”;*

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undnag-Undang Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak bahwa:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak bahwa:

“orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa sementara itu Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 - nya disebutkan bahwa “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku” . Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Bab I. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab I. Pasal 1 angka 9 Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang- undangan dan adat kebiasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri , sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa ;

Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, oleh karena itu

alangkah baiknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya ;

Menurut analisis Penulis, Pengadilan menyebutkan bahwa para pemohon telah mengetahui akibat hukum dari pangangkatan anak, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah akibat hukumnya, dari sisi Pemohon justru mengajukan:

Para Pemohon telah menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.

Menurut Penulis, pengangkatan anak dalam Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibat dari ketentuan hukum ini juga meliputi mengenai hak anak angkat atas pewarisan, bahwa dengan

kedudukannya tersebut anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris. Anak angkat hanya akan mewaris dari pewarisnya yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah, bahkan wasiat wajibah, oleh karenanya akan lebih baik jika ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim dan menjelaskan kembali kepada Para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang dimaksud dan dituangkan dalam penetapannya, dengan merujuk kepada akibat hukumnya.

Hal tersebut juga tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hal hak-hak anak yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada point e, g, i dan k, namun dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. ini secara otomatis hak mengenai harta waris dan nasab berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat, hal tersebut terjadi karena pengajuan dari para pemohon yang mengajukan anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dalam hal waris, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjelaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disinggung sebelumnya, karena para pemohon beragama Islam maka seharusnya berlaku hukum Islam.

Jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan nasabnya, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.

Prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri, dan sudah barang tentu hal ini menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut Islam, sementara pemohon beragama Islam. Hakim sebenarnya dalam hal ini bisa menjelaskan kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. Menurut hemat Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan

anak yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Kendal sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan Nasional yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya jelas sekali bahwa penetapan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya dan tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa:

Permohonan Pengangkatan Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan ;

Pengadilan menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ke instansi terkait;

Berdasarkan Pasal 49 jo. penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama. Para Pemohon saat melakukan hubungan hukum beragama Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang menetapkan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara penetapan anak yang termasuk dalam bidang hukum Perkawinan tersebut dalam Pasal 49 Undang-

Undang Peradilan Agama, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan namun di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal-pasalanya tidak menyinggung tentang anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa undang-undang yang terkait dengan pengangkatan anak, misalnya Undang-Undang Peradilan Agama pun tidak pula memberikan pengertian tentang anak angkat atau pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama pun hanya memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h. Pengertian angkat anak dalam Kompilasi Hukum Islam ini masuk dalam subbab kewarisan yang mengatur tentang wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat maupun sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 209.

Kompilasi Hukum Islam adalah acuan utama bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tentang perkawinan dan pengangkatan anak termasuk di dalamnya sesuai dengan latar belakang dirumuskannya kedua peraturan tersebut, dimana sebelum masa kemerdekaan Indonesia belum ada peraturan khusus bagi rakyat bumi putera beragama Islam, tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari

¹⁰¹ Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

masa ke masa. Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya, karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁰²

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundat-undangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.¹⁰³

¹⁰² Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

¹⁰³ *Ibid.*

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial peradilan agama.¹⁰⁴ Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan Pengadilan Agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

¹⁰⁴ Basiq Jalil, **Pengadilan Agama di Indonesia**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 109.

Dasar legalitas berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah intruksi presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.¹⁰⁵

Undang-Undang Peradilan Agama yang seharusnya sudah berlaku namun Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan penetapan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl adalah dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada prosedur pengangkatan anak. Alasan dari tidak adanya peraturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam yang telah dipositifkan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi alasan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendal tetap menerima permohonan pengangkatan anak beragama Islam, namun sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁶

Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginssel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yang pertama, yaitu aspek negatif (*het negatieve*

¹⁰⁵ Abdul Halim, **Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi**, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 259.

¹⁰⁶ Musthofa, **Op.Cit.**, hlm. 60.

aspect), aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*), aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹⁰⁷

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁸

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, namun juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal menganut prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip kedua yang digunakan oleh Hakim adalah prinsip *jus*

¹⁰⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 58.

curia novit yang mengandung makna dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹⁰⁹ Adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban Hakim agar benar-benar mengadili perkara perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum, namun bagaimanapun luasnya pengalaman seorang Hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks, seperti dalam perkara Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl ini, Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. **Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri.** Permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl diajukan pada tahun 2011, yang berarti Undang-Undang Peradilan Agama sudah diberlakukan selama hampir 5 (lima) tahun, saat Pengadilan Negeri Kendal menerima permohonan tersebut.

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri telah disebutkan sebelumnya, bahwa batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, yang menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex*

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 821.

generalis, dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas *lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. **Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.**¹¹⁰

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 ditetapkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (1) bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

¹¹⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 98.

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan anak yang akan diangkat yaitu ZASKIA NABILA PUTRI telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II , yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelaksanaan Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

C. Keabsahan Status Anak Angkat Atas Dikabulkannya Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Beragama Islam Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl Oleh Pengadilan Negeri Kendal Berperspektif Hukum Administrasi Negara

Nilai Putusan atau Penetapan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak bersifat konstitutif, karena Penetapan atau Putusan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, yang mana sangat tergantung dari Pengadilan mana yang menetapkan pengesahan pengangkatan anak.¹¹¹ Sahnya penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam, dan agar tetap mengikuti ketentuan hukum Allah SWT terkait dengan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

¹¹¹ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 120.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*),
2. Kekuatan bukti (*Bewijsende Kracht*),
3. Kekuatan untuk dilaksanakan (*Executoriale Kracht*).¹¹²

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangat berbeda. Seperti yang telah di singgung sebelumnya, harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang anaknya akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan ditetapkan Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan ditetapkan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan peraturan pengangkatan anak yang bersifat umum tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹¹³

Islam hanya mengakui dan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam arti status keluarganya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua

¹¹² Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia**, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 82.

¹¹³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Op.Cit.**, hlm. 8.

kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah swt.¹¹⁴ Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.¹¹⁵

Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, Penetapan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor:

¹¹⁴ Andi Syamsu, M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹¹⁵ *Ibid.*

27/Pdt.p/2011/PN. Kdl menurut Penulis tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena penetapan tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga yang berhak memutus perkara adalah Hakim Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex generalis*, dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas *lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.¹¹⁶

Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Dasar kewenangan di Indonesia menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Asas legalitas adalah prinsip negara hukum

¹¹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

dan sering dirumuskan sebagai *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.

Menurut pendapat Verhey, *Hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung 3 (tiga) aspek, yang pertama, yaitu aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek negatif menentukan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Ketiga, aspek materiil positif (*het materieel-positieve aspect*), aspek materiil positif menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹¹⁷

Berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa isi dari kewenangan itu normanya ditentukan oleh undang-undang. Dasar kewenangan hakim di Indonesia harus sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana tindakannya telah ditentukan di dalam undang-undang. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹¹⁸

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dengan

¹¹⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 58.

dikeluarkannya produk penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam maka penekanannya lebih kepada melindungi anak angkat dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab dari orang tua angkatnya atas pemeliharaan dirinya sebagai anak yang telah diangkat dalam keluarga orang tua angkatnya. Peranan Pengadilan Agama menjadi jelas bahwa dalam menetapkan anak angkat adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat, sehingga hak-hak anak angkat sebagai seorang anak dan sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya lebih terjamin.

Dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. yang diberikan Hakim merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat, namun oleh Hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis penting untuk disampaikan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Hubungan darah disini adalah mengenai nasab, dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.

Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum terhadap hak anak angkat yang beragama Islam dapat berbeda sama sekali. Terhadap kedudukannya, mereka berkedudukan sebagaimana layaknya kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya, mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak kandung sehingga dampaknya adalah terhadap hak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Putusan hakim bisa berakibat dua hal, yaitu memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat atau tidak memberikan sama sekali, karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam, sekalipun para pihak berperkara beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, jika dikaitkan dengan perlindungan anak, maka pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam Undang-Undang Peradilan Agama, pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, hal tersebut tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat mengenai kedudukannya dalam keluarga angkatnya termasuk hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagai anak angkat.

Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak, padahal dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya yang pertama dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Kedua, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa:

“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.”

Ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Pasal-pasal di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

Jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan nasabnya, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.¹¹⁹

Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak tersebut.

Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri, hal ini sudah barang tentu menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, sementara pemohon beragama Islam.

Menurut Bachsan Mustafa, kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yang pertama, yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah

¹¹⁹ Andi Syamsu, M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.¹²⁰

Penetapan tentang pengangkatan anak harus pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara, karena kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Hakim dalam Penetapan Nomor: 27/pdt.p/2011/pn. Kdl seharusnya bisa menjelaskan kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

Mengenai penetapan pengangkatan anak yang sudah terlanjur dikabulkan maka dalam hukum acara dikenal adanya asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.¹²¹ Sudikno menjelaskan bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai

¹²⁰ Bachsan Mustafa, *Loc. Cit.*

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 7.

memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).¹²²

Asas ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini, oleh karenanya kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, seperti halnya sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat mutlak, walaupun ada indikasi *judicial corruption*, daya berlaku sifat final dan mengikat itu tidak berkurang, maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya, namun berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Agama maka Penetapan Pengangkatan Anak Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena Pengadilan Negeri Kendal melanggar batas yurisdiksi kewenangan absolutnya maka sebaiknya Para Pemohon mengajukan ulang untuk pengangkatan anak ini agar hak-hak anak angkat maupun orang tua angkat bisa lebih memberikan kepastian hukum sesuai dengan hukum Islam.

Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah mencari hakim lain yang lebih tinggi kedudukannya, untuk memutuskan kembali, dalam hal ini dikenal ada lembaga pengadilan tingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Putusan hakim

¹²² *Ibid*, hlm. 9.

harus dikalahkan oleh putusan hakim juga, bukan oleh produk hukum lainnya. Pada titik ini terlihat bahwa kebenaran yang dikejar akhirnya harus tunduk pada formalitas di dalam hukum, bahwa putusan hakim merupakan sesuatu yang perlu dipastikan kebenarannya, semata-mata karena hukum juga mengejar kepastian.

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Maka terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.¹²³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

Lebih lanjut penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

“Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.”

Memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi. Tidak ada atau tidak dikenal upaya hukum di dalam permohonan. Permohonan yang tidak

¹²³ Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 42.

diterima, misalnya, menyangkut masalah kompetensi pengadilan maka dapat diajukan kembali kepada pengadilan lain yang berwenang.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 123.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl menetapkan permohonan pengangkatan anak beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dalam perspektif prinsip perlindungan anak adalah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai prosedur pengangkatan anak maka berakibat pertimbangan Hakim **ada yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak, yakni prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)**.
2. Status anak angkat atas dikabulkannya permohonan penetapan pengangkatan anak beragama Islam Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl oleh Pengadilan Negeri Kendal berperspektif Hukum Administrasi Negara, **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat** karena penetapan tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga yang berhak memutus perkara adalah Hakim Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.

5.2 SARAN

1. Bagi para pembuat undang-undang diperlukannya suatu peraturan yang khusus, menyeluruh dan terintegrasi mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, yang melibatkan para ahli hukum Islam dan para alim ulama dari berbagai kalangan untuk mendapatkan ijma yang kuat dan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.
2. Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama harus lebih kritis dan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang terkait dengan pengangkatan anak untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan dalam pertimbangan hukumnya meliputi semua aspek hukum, para Hakim juga harus lebih memperhatikan kompetensi absolut yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak menghasilkan penetapan ataupun putusan yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum.
3. Bagi para pemohon lebih baik mengajukan ulang permohonan pengangkatan anak dengan pengajuan ke tingkat kasasi untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat tersebut.
4. Bagi notaris harus mengerti perihal pengangkatan anak, dalam hal ini adalah siapa yang berwenang dalam pengangkatan anak tersebut agar dapat membantu klien dalam hal pembuatan akta waris maupun wasiat jika dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Agussalim Andi Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Syamsu, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Djaja S Meliala, *Pengangkatan anak (adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Ian McLeod, *Legal Method*, London: Macmillan, 1999.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- I. P. M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2000.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- L.J. van Apeldoorm, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Muhammad Joni dan Zulchaena Z.T, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak kewenangan pengadilan agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatam, 2008.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- , *Tentang Wewenang*, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. alumni, 2015.
- , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- , *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Bina aksara, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Kompilasi Hukum Islam.

Staatblad 1917 Nomor 129.

HIR.

SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

Committee on the Rights of the Child.

WEBSITE

<http://kbbi.web.id/anak>, (diakses pada tanggal 25 Mei 2019 jam 21.00).

www.google.com (diakses pada tanggal 1 Juli 2019 jam 10.00).